

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2017, SERI E.13

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR: 15 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan telah disusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan kelembagaan perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon maka dipandang perlu Revisi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Revisi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola Pendidikan di Kabupaten Cirebon;
7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
9. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
10. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2017-2019.
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019.
- c. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2017 – 2019 Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN**
Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**
Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Bab III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI**
Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**
Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.
- Bab VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VII : PENUTUP**
Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2017 – 2019.

BAB V
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 15, SERI E.13

**REVISI
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON 2014-2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
Sumber 45611

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmatNya lah penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Renstra merupakan dokumen penting untuk memberikan arah bagi setiap pengelola pendidikan dalam merealisasikan cita-cita mencerdaskan bangsa sesuai komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Dengan demikian semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah semestinya tetap mengacu pada Renstra tersebut.

Untuk merealisasikan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon perlu dukungan dan kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat, karena tanpa adanya dukungan maka akan menemui kesulitan dan kendala yang tidak sedikit.

Draft Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berisi mengenai gambaran umum, analisis lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran serta strategi untuk pencapaian visi dan misi yang diuraikan secara ringkas dan jelas agar dapat mudah dipahami untuk dipedomani.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Sumber 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. Asdullah, SA, MM.
NIP. 19640203 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Dan Sasaran	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Kerangka Pikir	4
1.5 Sistimatika Penulisan	6
BAB 11 GAMBARAN LAYANAN DINAS	7
2.1 Struktur Organisasi	7
2.2 Fungsi dan tugas Pokok Dinas	8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas	8
2.4 Karakteristik Pendidikan	9
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	30
3.1 Telaahan Kebijakan	30
3.2 Analisisi lingkungan Internal	33
3.3 Analisisi lingkungan Eksternal	35
3.4 Permasalahan yang Dihadapi	37
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Visi.....	40
4.2 Misi	43
4.3 Tujuan Pembangunan Pendidikan	45
4.4 Sasaran Strategis	47
5.1 Strategi Pembangunan Pendidikan	55
5.2 Arah Kebijakan	61
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN	64
5.1 Non Urusan	64
5.2 Urusan	64
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	78
6.1 Indikator kinerja	79
BAB VII PENUTUP	80
7.1 Kesimpulan	80
7.2 Saran	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai *usaha sadar dan terencana* untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan beradasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumberdaya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi kemasa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secara umum.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan juga diarahkan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara top-down planning dan bottom up planning.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan pendidikan mendorong Dinas Pendidikan untuk segera mengimplementasikan langkah pelayanan menuju tercapainya target IPM khususnya dibidang pendidikan dengan menyusun dan merumuskan rencana program strategis penyelenggaraan teknis di bidang pendidikan. Untuk maksud tersebut perlu adanya Rencana Strategis bidang Pendidikan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Cirebon adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Dinas Pendidikan pada

periode tahun 2014-2019 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon.

1.2.2 Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2014–2019, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- i. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- j. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Nega Ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- n. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Seri : E. 3)
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.4. KERANGKA PIKIR

Renstra Dinas Pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan dokumen perencanaan baik tingkat Provinsi maupun Pusat, kondisi dan potensi serta masukan-masukan dari stakeholders untuk bersama-sama menggagas peningkatan kualitas pendidikan melalui Rapat/pertemuan , rakoor dan serta kegiatan lain dengan tujuan menjaring keinginan-keinginan stakeholders untuk kemudian dianalisis dan diformulasikan kedalam perumusan Visi dan Misi Dinas Pendidikan.

Setelah perumusan visi dan misi disepakati, dilakukan analisis lingkungan strategis untuk menentukan strategi umum dan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical succes factor/ CSF). CSF ini menjadi acuan dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran serta cara mencapainya yang mencakup kebijakan dan program-program pembangunan Dinas Pendidikan tahun 2014 – 2019.

Agar perumusan tujuan dan sasaran menjadi terukur, dirumuskan indikator kinerja, terutama indikator kinerja pada tingkat sasaran. Indikator kinerja

sasaran ini merupakan gambaran prestasi kerja yang akan dicapai dengan pendekatan outcome (hasil) dari program-program bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2014 - 2019 disajikan dalam bagan 1.1.

Bagan 1.1. Alur Pikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 2014-2019



1.5. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, tujuan dan sasaran, landasan hukum penyusunan, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Berisi tentang struktur organisasi, fungsi dan tugas pokok, kinerja dinas serta karakteristik pendidikan di Kabupaten Cirebon.

BAB. III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Menyajikan uraian analisis lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, serta permasalahan yang dihadapi.

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

Berisi tentang pernyataan Visi, Misi dan penjelasannya, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan lima tahun kedepan.

BAB. V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang strategi dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan serta arah kebijakan pendidikan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menyajikan indikator kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019

BAB VII PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sesuai peraturan Bupati nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sum Bagian Umum
- 3) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Membawahi:
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset
 - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
- 4) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset
 - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
- 5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Sarana prasarana, aset dan data PAUD
 - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
- 6) Bidang Pendidikan Non Formal
 - a) Seksi Kurikulum
 - b) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan
 - c) Kursus dan Kelembagaan

2.2 Fungsi dan Tugas Pokok Dinas

Fungsi Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan Tugas Pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon meliputi pelayanan pendidikan terhadap seluruh anak usia sekolah mulai dari Pendidikan Usia Dini, SD, SMP, SMA, SMK serta pendidikan non formal melalui Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional.

Agar anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sesuai haknya, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bea siswa dan lain-lain. Sedangkan untuk pemenuhan tenaga pendidik dipenuhi melalui penangkatan CPNS serta penunjukan guru honorer menggunakan dana BOS sesuai juknis yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengenai kebutuhan sarana prasarana dipenuhi melalui dana Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain, dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Cirebon serta dana partisipasi lainnya.

Pada masa lalu tata kelola pendidikan belum sepenuhnya berbasis data atau sistem informasi yang akurat, tepat dan akuntabel. Namun sekarang sistem tersebut telah dibangun diantaranya DAPODIK, PADAMU NEGERI dan lain-lain meskipun sampai saat ini masih terus menerus diadakan penyempurnaan dan perbaikan guna terpenuhinya satu-satunya data pendidikan yang dapat digunakan oleh stakeholders yang membutuhkan.

2.4 Karakteristik Pendidikan

Pembangunan pendidikan harus dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu antar instansi pemerintah serta antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Untuk itu perlu dikembangkan iklim pembangunan pendidikan yang memungkinkan bagi setiap komponen pemerintahan maupun masyarakat untuk bisa secara bersama-sama membahas pendidikan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing.

Masalah-masalah teknis non-kependidikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan antara lain komunikasi, transportasi, sosial budaya, dan sosial ekonomi. Penanganannya perlu dilakukan secara lintas sektoral, agar pemerataan pendidikan dan pemberian pelayanan pendidikan minimal bagi masyarakat bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu komponen IPM adalah indek pendidikan, sedangkan RLS dan AMH merupakan indikator dalam pencapaian indek pendidikan. Dengan demikian perlu adanya data yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan tentang jumlah penduduk usia sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana, karena semua itu saling terkait dalam meningkatkan RLS dan AMH sehingga pada gilirannya dapat mendongkrak IPM sesuai target yang ditetapkan.

2.4.1 Jumlah Penduduk usia sekolah

Penduduk Kabupaten Cirebon berjumlah 2.161.929 orang, laki-laki 1.088.920 Orang dan perempuan 1.073.009 orang tersebar di 40 Kecamatan / 424 desa dan kelurahan dengan kondisi ekonomi keluarga 30,92% pra KS, 27,91% KS 1, 24,94 % KS 14,11% KS 111 dan selebihnya merupakan keluarga KS 111+ . Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SM sumber data Suseda tahun 2008 sebanyak 902.326 orang terdiri dari laki-laki 458.503 orang dan perempuan 443.823 orang.

Penduduk Usia Sekolah

PENDUDUK UMUR 7 - 12 TH MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2012)
Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	0	7.304	299	7.603
2	011 PASALEMAN	91	2.580	0	2.671
3	020 CILEDUG	98	4.756	98	4.952
4	021 PABUARAN	103	5.302	103	5.508
5	030 LOSARI	175	7.449	0	7.624
6	031 PABEDILAN	0	8.426	0	8.426
7	040 BABAkan	118	7.732	0	7.850
8	041 GEBANG	98	8.484	198	8.780
9	050 KARANGSEMBUNG	84	5.823	0	5.907
10	051 KARANGWARENG	0	4.026	158	4.184
11	060 LEMAHABANG	0	6.697	312	7.009
12	061 SUSUKAN LEBAK	74	5.202	67	5.343
13	070 SEDONG	211	4.809	0	5.020
14	080 ASTANAJAPURA	0	12.267	251	12.518
15	081 PANGENAN	0	5.745	217	5.962
16	090 MUNDU	0	11.638	148	11.786
17	100 BEBER	0	3.419	76	3.495
18	101 GREGED	0	6.503	0	6.503
19	111 TALUN	0	8.742	131	8.873
20	120 SUMBER	0	10.385	126	10.511
21	121 DUKUPUNTANG	0	9.811	99	9.910
22	130 PALIMANAN	96	7.704	0	7.800
23	140 PLUMBON	198	12.167	303	12.668
24	141 DEPOK	118	8.870	230	9.218
25	150 WERU	0	7.758	310	8.068
26	151 PLERED	193	7.067	0	7.260
27	161 TENGAH TANI	88	5.567	88	5.743
28	162 KEDAWUNG	0	7.787	300	8.087
29	171 GUNUNGJATI	125	9.694	500	10.319
30	180 KAPETAKAN	0	7.990	258	8.248
31	181 SURANENGGALA	0	4.489	179	4.668
32	190 KLANGENAN	116	5.947	107	6.170
33	191 JAMBLANG	103	4.389	0	4.492
34	200 ARJAWINANGUN	0	9.118	0	9.118
35	201 PANGURAGAN	0	4.760	125	4.885
36	210 CIWARINGIN	0	4.594	0	4.594
37	211 GEMPOL	94	5.793	0	5.887
38	220 SUSUKAN	0	9.899	0	9.899
39	230 GEGESIK	0	9.772	113	9.885
40	231 KALIWEDI	0	4.175	0	4.175
Jumlah		2.183	284.640	4.796	291.619

Sumber Data Survei IPM 2012, Kabupaten Cirebon

PENDUDUK KELOMPOK UMUR 13 S.D. 15 TAHUN MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2012)

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	0	3.409	790	4.199
2	011 PASALEMAN	0	1.402	0	1.402
3	020 CILEDUG	0	3.116	384	3.500
4	021 PABUARAN	0	2.432	0	2.432
5	030 LOSARI	0	3.663	187	3.850
6	031 PABEDILAN	0	2.749	615	3.364
7	040 BABAKAN	0	5.128	457	5.585
8	041 GEBANG	0	3.916	598	4.514
9	050 KARANGSEMBUNG	0	2.101	309	2.410
10	051 KARANGWARENG	0	1.370	152	1.522
11	060 LEMAHABANG	0	2.155	722	2.877
12	061 SUSUKAN LEBAK	0	1.816	425	2.241
13	070 SEDONG	108	1.439	730	2.277
14	080 ASTANAJAPURA	0	3.590	877	4.467
15	081 PANGENAN	0	2.357	570	2.927
16	090 MUNDU	0	3.774	872	4.646
17	100 BEBER	0	2.192	234	2.426
18	101 GREGED	0	4.173	245	4.418
19	111 TALUN	0	4.247	530	4.777
20	120 SUMBER	0	6.229	371	6.600
21	121 DUKUPUNTANG	0	4.800	297	5.097
22	130 PALIMANAN	0	3.441	386	3.827
23	140 PLUMBON	0	5.563	388	5.951
24	141 DEPOK	0	3.177	235	3.412
25	150 WERU	0	4.736	463	5.199
26	151 PLERED	0	3.350	292	3.642
27	161 TENGAH TANI	0	2.435	265	2.700
28	162 KEDAWUNG	150	3.786	165	4.101
29	171 GUNUNGJATI	125	5.845	369	6.339
30	180 KAPETAKAN	0	4.047	912	4.959
31	181 SURANENGGALA	0	2.703	0	2.703
32	190 KLANGENAN	0	3.268	537	3.805
33	191 JAMBLANG	103	1.612	412	2.127
34	200 ARJAWINANGUN	127	5.154	127	5.408
35	201 PANGURAGAN	0	3.896	0	3.896
36	210 CIWARINGIN	135	2.566	369	3.070
37	211 GEMPOL	94	3.478	0	3.572
38	220 SUSUKAN	0	5.665	148	5.813
39	230 GEGESIK	0	2.564	783	3.347
40	231 KALIWEDI	0	2.838	291	3.129
Jumlah		842	136.182	15.507	152.531

Sumber Data Survei IPM 2012, Kabupaten Cirebon

**PENDUDUK UMUR 16 S.D. 18 TH MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH DAN
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TAHUN 2012)**

Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Partisipasi Sekolah			Jumlah
		Tidak / Belum Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
1	010 WALED	0	795	3.251	4.046
2	011 PASALEMAN	0	553	787	1.340
3	020 CILEDUG	0	1.128	624	1.752
4	021 PABUARAN	0	1.003	1.604	2.607
5	030 LOSARI	0	2.368	1.582	3.950
6	031 PABEDILAN	0	1.225	1.935	3.160
7	040 BABAKAN	0	2.174	524	2.698
8	041 GEBANG	100	598	3.438	4.136
9	050 KARANGSEMBUNG	0	957	1.607	2.564
10	051 KARANGWARENG	0	790	1.367	2.157
11	060 LEMAHABANG	0	1.014	1.612	2.626
12	061 SUSUKAN LEBAK	0	843	277	1.120
13	070 SEDONG	0	622	1.689	2.311
14	080 ASTANAJAPURA	0	1.630	3.370	5.000
15	081 PANGENAN	0	1.093	3.173	4.266
16	090 MUNDU	0	1.914	4.643	6.557
17	100 BEBER	0	1.477	1.141	2.618
18	101 GREGED	0	1.238	2.111	3.349
19	111 TALUN	0	2.534	1.389	3.923
20	120 SUMBER	0	3.008	2.223	5.231
21	121 DUKUPUNTANG	0	1.549	2.415	3.964
22	130 PALIMANAN	97	2.794	787	3.678
23	140 PLUMBON	0	2.594	1.572	4.166
24	141 DEPOK	0	1.257	2.970	4.227
25	150 WERU	0	2.651	2.933	5.584
26	151 PLERED	0	2.242	2.781	5.023
27	161 TENGAH TANI	0	1.107	2.220	3.327
28	162 KEDAWUNG	0	4.148	1.917	6.065
29	171 GUNUNGJATI	250	3.457	1.544	5.251
30	180 KAPETAKAN	0	1.824	3.495	5.319
31	181 SURANENGGALA	0	2.602	338	2.940
32	190 KLANGENAN	0	2.216	1.689	3.905
33	191 JAMBLANG	0	2.156	2.316	4.472
34	200 ARJAWINANGUN	0	1.653	2.454	4.107
35	201 PANGURAGAN	0	1.753	774	2.527
36	210 CIWARINGIN	0	2.185	1.308	3.493
37	211 GEMPOL	0	1.198	584	1.782
38	220 SUSUKAN	0	2.791	1.336	4.127
39	230 GEGESIK	113	2.805	1.388	4.306
40	231 KALIWEDI	0	1.553	1.452	3.005
Jumlah		560	71.499	74.620	146.679

Sumber Data Survei IPM 2012, Kabupaten Cirebon

A. Jumlah peserta didik

Banyak sedikitnya jumlah peserta didik berpengaruh langsung pada tingkat capaian RLS sekaligus tingkat capaian APK, APM pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan jumlah peserta didik pada semua jenjang.

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Waled	2.477	2.387	4.864	0	0	0	4.864
2	Ciledug	2.381	2.271	4.652	76	77	153	4.805
3	Losari	2.238	2.037	4.275	0	0	0	4.275
4	Babakan	3.573	3.345	6.918	0	0	0	6.918
5	Karang Sembung	1.880	1.812	3.692	0	0	0	3.692
6	Lemahabang	2.920	2.770	5.690	200	199	399	6.089
7	Sedong	2.135	2.009	4.144	0	0	0	4.144
8	Astana Japura	2.611	2.419	5.030	240	232	472	5.502
9	Mundu	3.145	2.859	6.004	38	16	54	6.058
10	Beber	2.360	2.140	4.500	0	0	0	4.500
11	Sumber	4.356	4.070	8.426	900	775	1.675	10.101
12	Palimanan	3.150	3.042	6.192	0	0	0	6.192
13	Plumbon	3.746	3.366	7.112	0	0	0	7.112
14	Weru	3.468	3.277	6.745	0	0	0	6.745
15	Kapetakan	2.548	2.393	4.941	0	0	0	4.941
16	Klangenan	2.725	2.559	5.284	35	20	55	5.339
17	Arjawinangun	3.509	3.215	6.724	43	50	93	6.817
18	Ciwaringin	1.735	1.610	3.345	0	0	0	3.345
19	Susukan	2.913	2.881	5.794	127	132	259	6.053
20	Gegesik	3.047	2.812	5.859	0	0	0	5.859
21	Susukan Lebak	1.751	1.726	3.477	0	0	0	3.477
22	Pabedilan	2.288	2.120	4.408	38	28	66	4.474
23	Dukupuntang	2.655	2.499	5.154	0	0	0	5.154
24	Panguragan	2.017	1.935	3.952	26	20	46	3.998
25	Kaliwedi	1.626	1.602	3.228	0	0	0	3.228
26	Pangenan	1.847	1.629	3.476	0	0	0	3.476
27	Gebang	2.879	2.655	5.534	170	175	345	5.879
28	Depok	2.923	2.878	5.801	20	13	33	5.834
29	Kedawung	2.076	1.902	3.978	373	245	618	4.596
30	Karangwareng	1.360	1.225	2.585	0	0	0	2.585
31	Talun	2.793	2.679	5.472	166	155	321	5.793
32	Gunung Jati	2.768	2.737	5.505	269	214	483	5.988
33	Pasaleman	1.259	1.175	2.434	0	0	0	2.434
34	Pabuaran	1.703	1.560	3.263	0	0	0	3.263
35	Tengah Tani	2.205	1.985	4.190	0	0	0	4.190
36	Plered	3.115	2.892	6.007	0	0	0	6.007
37	Gempol	2.176	1.874	4.050	87	61	148	4.198
38	Greged	2.992	2.729	5.721	0	0	0	5.721
39	Suranenggala	2.204	1.964	4.168	0	0	0	4.168
40	Jamblang	1.918	1.740	3.658	55	56	111	3.769
JML		101.472	94.780	196.252	2.863	2.468	5.331	201.583

Sumber data : Profil Pendidikan 2016/2017

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Waled	525	572	1.097	401	347	748	525
2	Ciledug	805	934	1.739	346	268	614	805
3	Losari	835	989	1.824	196	164	360	835
4	Babakan	603	724	1.327	495	319	814	603
5	Karang Sembung	789	856	1.645	234	97	331	789
6	Lemahabang	849	958	1.807	400	257	657	849
7	Sedong	353	347	700	0	0	0	353
8	Astana Japura	439	538	977	381	317	698	439
9	Mundu	645	709	1.354	132	108	240	645
10	Beber	517	522	1.039	335	180	515	517
11	Sumber	1348	1537	2.885	706	567	1.273	1348
12	Palimanan	1622	1911	3.533	790	515	1.305	1622
13	Plumbon	1004	1048	2.052	140	105	245	1004
14	Weru	991	984	1.975	1139	783	1.922	991
15	Kapetakan	964	884	1.848	0	0	0	964
16	Klangenan	735	698	1.433	107	96	203	735
17	Arjawinangun	744	909	1.653	489	390	879	744
18	Ciwaringin	916	1060	1.976	664	476	1.140	916
19	Susukan	604	704	1.308	230	223	453	604
20	Gegesik	1178	1346	2.524	457	380	837	1178
21	Susukan Lebak	778	755	1.533	8	0	8	778
22	Pabedilan	780	812	1.592	104	130	234	780
23	Dukupuntang	558	390	948	753	681	1.434	558
24	Panguragan	481	513	994	157	160	317	481
25	Kaliwedi	568	530	1.098	91	54	145	568
26	Pangenan	426	377	803	356	289	645	426
27	Gebang	748	737	1.485	191	168	359	748
28	Depok	884	864	1.748	271	209	480	884
29	Kedawung	470	609	1.079	153	76	229	470
30	Karangwareng	393	339	732	53	32	85	393
31	Talun	515	518	1.033	0	0	0	515
32	Gunung Jati	1267	1362	2.629	118	99	217	1267
33	Pasaleman	325	329	654	169	131	300	325
34	Pabuaran	460	398	858	199	155	354	460
35	Tengah Tani	507	485	992	47	27	74	507
36	Plered	1234	1201	2.435	0	0	0	1234
37	Gempol	650	583	1.233	0	0	0	650
38	Greged	396	409	805	54	31	85	396
39	Suranenggala	843	902	1.745	24	12	36	843
40	Jamblang	708	793	1.501	0	0	0	708
JML		29.457	31.136	60.593	10.390	7.846	18.236	29.457

Profil Pendidikan 2016/2017

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Waled	207	645	852	0	0	0	852
2	Ciledug	205	512	717	132	160	292	1.009
3	Losari	267	583	850	136	79	215	1.065
4	Babakan	355	696	1.051	39	42	81	1.132
5	Karang Sembung	0	0	0	26	41	67	67
6	Lemahabang	376	716	1.092	242	448	690	1.782
7	Sedong	0	0	0	0	0	0	0
8	Astana Japura	332	676	1.008	0	0	0	1.008
9	Mundu	0	0	0	0	0	0	0
10	Beber	314	567	881	113	125	238	1.119
11	Sumber	452	754	1.206	15	17	32	1.238
12	Palimanan	408	654	1.062	61	39	100	1.162
13	Plumbon	339	717	1.056	9	10	19	1.075
14	Weru	0	0	0	30	20	50	50
15	Kapetakan	0	0	0	0	0	0	0
16	Klangenan	0	0	0	42	8	50	50
17	Arjawinangun	371	647	1.018	0	0	0	1.018
18	Ciwaringin	321	521	842	0	0	0	842
19	Susukan	271	578	849	65	98	163	1.012
20	Gegesik	325	698	1.023	140	352	492	1.515
21	Susukan Lebak	0	0	0	0	0	0	0
22	Pabedilan	216	463	679	55	84	139	818
23	Dukupuntang	325	602	927	121	70	191	1.118
24	Panguragan	0	0	0	242	323	565	565
25	Kaliwedi	0	0	0	0	0	0	0
26	Pangenan	0	0	0	25	29	54	54
27	Gebang	0	0	0	0	0	0	0
28	Depok	0	0	0	0	0	0	0
29	Kedawung	0	0	0	174	268	442	442
30	Karangwareng	246	691	937	0	0	0	937
31	Talun	0	0	0	0	0	0	0
32	Gunung Jati	0	0	0	0	0	0	0
33	Pasaleman	0	0	0	0	0	0	0
34	Pabuaran	0	0	0	0	0	0	0
35	Tengah Tani	0	0	0	117	33	150	150
36	Plered	0	0	0	0	0	0	0
37	Gempol	0	0	0	0	0	0	0
38	Greged	0	0	0	0	0	0	0
39	Suranenggala	350	440	790	0	0	0	790
40	Jamblang	369	775	1.144	0	0	0	1.144
JML		6.049	11.935	17.984	1.784	2.246	4.030	22.014

Profil Pendidikan 2016/2017

**JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)**

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	Waled	0	0	0	204	212	416	416
2	Ciledug	0	0	0	728	815	1.543	1.543
3	Losari	0	0	0	392	193	585	585
4	Babakan	0	0	0	549	382	931	931
5	Karang Sembung	0	0	0	0	0	0	0
6	Lemahabang	545	1.131	1.676	1.884	1.316	3.200	4.876
7	Sedong	0	0	0	56	106	162	162
8	Astana Japura	0	0	0	1.526	509	2.035	2.035
9	Mundu	1.611	521	2.132	214	60	274	2.406
10	Beber	0	0	0	82	85	167	167
11	Sumber	0	0	0	1.484	629	2.113	2.113
12	Palimanan	0	0	0	1.204	1.036	2.240	2.240
13	Plumbon	0	0	0	463	426	889	889
14	Weru	0	0	0	1.050	830	1.880	1.880
15	Kapetakan	0	0	0	125	52	177	177
16	Klangenan	0	0	0	36	20	56	56
17	Arjawinangun	0	0	0	522	473	995	995
18	Ciwaringin	0	0	0	830	597	1.427	1.427
19	Susukan	678	465	1.143	253	168	421	1.564
20	Gegesik	0	0	0	1.296	736	2.032	2.032
21	Susukan Lebak	0	0	0	122	73	195	195
22	Pabedilan	0	0	0	0	0	0	0
23	Dukupuntang	0	0	0	1.591	1.614	3.205	3.205
24	Panguragan	0	0	0	203	138	341	341
25	Kaliwedi	0	0	0	284	189	473	473
26	Pangenan	0	0	0	298	235	533	533
27	Gebang	491	99	590	328	340	668	1.258
28	Depok	0	0	0	1.468	1.608	3.076	3.076
29	Kedawung	333	1.361	1.694	2.866	2.400	5.266	6.960
30	Karangwareng	0	0	0	130	185	315	315
31	Talun	0	0	0	0	0	0	0
32	Gunung Jati	537	447	984	84	69	153	1.137
33	Pasaleman	0	0	0	80	108	188	188
34	Pabuaran	0	0	0	1.564	348	1.912	1.912
35	Tengah Tani	0	0	0	0	0	0	0
36	Plered	0	0	0	964	240	1.204	1.204
37	Gempol	0	0	0	41	40	81	81
38	Greged	0	0	0	89	129	218	218
39	Suranenggala	0	0	0	0	0	0	0
40	Jamblang	1.383	711	2.094	0	0	0	2.094
JML		5.578	4.735	10.313	23.010	16.361	39.371	49.684

Profil Pendidikan 2016/2017

B. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni " Masyarakat Kabupaten Cirebon Cerdas dan Kompetitif " diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah yang memadai. Saat ini jumlahnya masih sangat kurang atau belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan sehingga mayoritas sekolah mengangkat tenaga honorer untuk menutup kebutuhan tersebut. Selain itu masih terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain ; (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini dapat dilihat jumlah tenaga penndidik dan kependidikan di Kabupaten Cirebon.

Jumlah Tenaga Pendidik

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	40	105	145	94	239
2	Ciledug	7	34	111	152	87	239
3	Losari	2	32	95	129	87	216
4	Babakan	4	55	149	208	113	321
5	Karang Sembung	3	40	80	123	74	197
6	Lemahabang	1	55	104	160	121	281
7	Sedong	1	28	85	114	66	180
8	Astana Japura	3	30	97	130	104	234
9	Mundu	1	41	91	133	112	245
10	Beber	2	21	80	103	70	173
11	Sumber	1	72	233	306	240	546
12	Palimanan	2	72	149	223	92	315
13	Plumbon	1	93	171	265	87	352
14	Weru	9	56	137	202	86	288
15	Kapetakan	4	39	94	137	96	233
16	Klangenan	5	59	146	210	84	294
17	Arjawinangun	5	76	137	218	88	306
18	Ciwaringin	2	38	100	140	38	178
19	Susukan	5	44	121	170	117	287
20	Gegesik	4	85	167	256	68	324
21	Susukan Lebak	5	29	74	108	66	174

22	Pabedilan	3	49	102	154	70	224
23	Dukupuntang	2	69	123	194	99	293
24	Panguragan	4	42	81	127	80	207
25	Kaliwedi	4	47	72	123	43	166
26	Pangenan	3	18	59	80	62	142
27	Gebang	4	45	113	162	121	283
28	Depok	4	63	157	224	83	307
29	Kedawung	9	26	96	131	110	241
30	Karangwareng	2	25	59	86	46	132
31	Talun	2	38	122	162	111	273
32	Gunung Jati	7	56	163	226	112	338
33	Pasaleman	3	21	63	87	35	122
34	Pabuaran	0	36	74	110	57	167
35	Tengah Tani	1	22	88	111	91	202
36	Plered	8	66	115	189	82	271
37	Gempol	0	53	88	141	77	218
38	Greged	8	24	67	99	103	202
39	Suranenggala	2	36	97	135	72	207
40	Jamblang	5	56	87	148	67	215
JML		138	1.831	4.352	6.321	3.511	9.832

Profil Pendidikan 2016/2017

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	16	15	31	95	126
2	Ciledug	0	24	34	58	87	145
3	Losari	0	20	30	50	104	154
4	Babakan	0	18	26	44	121	165
5	Karang Sembung	1	15	32	48	62	110
6	Lemahabang	0	19	31	50	76	126
7	Sedong	1	12	8	21	26	47
8	Astana Japura	0	9	18	27	113	140
9	Mundu	0	13	22	35	56	91
10	Beber	0	9	21	30	61	91
11	Sumber	0	31	65	96	189	285
12	Palimanan	0	29	78	107	164	271
13	Plumbon	1	22	41	64	77	141
14	Weru	1	27	37	65	126	191
15	Kapetakan	0	24	11	35	58	93
16	Klangenan	0	22	17	39	92	131
17	Arjawinangun	1	22	29	52	186	238
18	Ciwaringin	0	25	19	44	146	190
19	Susukan	0	12	19	31	62	93
20	Gegesik	0	28	38	66	119	185
21	Susukan Lebak	0	13	30	43	38	81
22	Pabedilan	0	19	27	46	62	108
23	Dukupuntang	0	9	22	31	154	185
24	Panguragan	0	7	23	30	59	89
25	Kaliwedi	0	14	22	36	59	95
26	Pangenan	0	7	17	24	116	140
27	Gebang	0	21	21	42	103	145
28	Depok	0	19	29	48	102	150
29	Kedawung	0	6	28	34	37	71
30	Karangwareng	0	8	9	17	50	67
31	Talun	0	12	29	41	25	66

32	Gunung Jati	1	18	62	81	83	164
33	Pasaleman	0	9	11	20	47	67
34	Pabuaran	0	14	12	26	64	90
35	Tengah Tani	0	12	19	31	30	61
36	Plered	0	29	47	76	62	138
37	Gempol	0	15	16	31	59	90
38	Greged	0	12	13	25	43	68
39	Suranenggala	0	16	26	42	65	107
40	Jamblang	0	24	31	55	33	88
JML		6	681	1.085	1.772	3.311	5.083

Profil Pendidikan 2016/2017

JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	18	8	26	17	43
2	Ciledug	0	11	12	23	35	58
3	Losari	0	17	7	24	31	55
4	Babakan	0	10	28	38	30	68
5	Karang Sembung	0	0	0	0	14	14
6	Lemahabang	0	7	33	40	68	108
7	Sedong	0	0	0	0	0	0
8	Astana Japura	0	26	1	27	15	42
9	Mundu	0	0	0	0	0	0
10	Beber	0	14	20	34	31	65
11	Sumber	0	14	33	47	41	88
12	Palimanan	0	17	33	50	24	74
13	Plumbon	0	14	26	40	28	68
14	Weru	0	0	0	0	10	10
15	Kapetakan	0	0	0	0	0	0
16	Klangenan	0	0	1	1	9	10
17	Arjawinangun	0	10	35	45	8	53
18	Ciwaringin	0	26	5	31	13	44
19	Susukan	0	19	8	27	29	56
20	Gegesik	0	20	12	32	67	99
21	Susukan Lebak	0	0	0	0	0	0
22	Pabedilan	0	8	16	24	30	54
23	Dukupuntang	0	14	29	43	53	96
24	Panguragan	0	0	0	0	30	30
25	Kaliwedi	0	0	0	0	0	0
26	Pangenan	0	0	0	0	15	15
27	Gebang	0	0	0	0	0	0
28	Depok	0	0	0	0	0	0
29	Kedawung	0	0	1	1	73	74
30	Karangwareng	0	13	10	23	0	23
31	Talun	0	0	0	0	0	0
32	Gunung Jati	0	0	0	0	0	0
33	Pasaleman	0	0	0	0	0	0
34	Pabuaran	0	0	0	0	0	0
35	Tengah Tani	0	0	0	0	29	29
36	Plered	0	0	0	0	0	0
37	Gempol	0	0	0	0	0	0
38	Greged	0	0	0	0	0	0
39	Suranenggala	0	9	16	25	26	51
40	Jamblang	0	15	27	42	26	68
JML		0	282	361	643	752	1.395

Profil Pendidikan 2016/2017

JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	Waled	0	0	0	0	30	30
2	Ciledug	0	0	2	2	84	86
3	Losari	0	0	0	0	44	44
4	Babakan	0	0	0	0	74	74
5	Karang Sembung	0	0	0	0	0	0
6	Lemahabang	1	33	21	55	196	251
7	Sedong	0	0	0	0	17	17
8	Astana Japura	0	0	0	0	144	144
9	Mundu	0	24	42	66	82	148
10	Beber	0	0	0	0	17	17
11	Sumber	0	0	0	0	118	118
12	Palimanan	0	0	3	3	157	160
13	Plumbon	2	4	0	6	79	85
14	Weru	0	0	2	2	103	105
15	Kapetakan	0	0	0	0	34	34
16	Klangenan	0	0	0	0	16	16
17	Arjawinangun	0	0	0	0	125	125
18	Ciwaringin	0	0	2	2	127	129
19	Susukan	0	28	6	34	61	95
20	Gegesik	0	0	0	0	166	166
21	Susukan Lebak	0	0	0	0	20	20
22	Pabedilan	0	0	0	0	0	0
23	Dukupuntang	0	0	0	0	233	233
24	Panguragan	0	0	0	0	30	30
25	Kaliwedi	0	0	0	0	40	40
26	Pangenan	0	0	0	0	74	74
27	Gebang	0	15	3	18	95	113
28	Depok	0	0	0	0	172	172
29	Kedawung	0	14	42	56	467	523
30	Karangwareng	0	0	0	0	30	30
31	Talun	0	0	0	0	0	0
32	Gunung Jati	0	14	7	21	58	79
33	Pasaleman	0	0	0	0	24	24
34	Pabuaran	0	0	0	0	96	96
35	Tengah Tani	0	0	0	0	0	0
36	Plered	0	0	0	0	75	75
37	Gempol	0	0	0	0	18	18
38	Greged	0	0	0	0	38	38
39	Suranenggala	0	0	0	0	0	0
40	Jamblang	0	42	11	53	41	94
JML		3	174	141	318	3.185	3.503

Profil Pendidikan 2016/2017

D. Jumlah sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mutlak diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Saat ini yang terlihat jelas adalah masih kurangnya daya tampung apabila dibandingkan antara rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada rendahnya APK, APM di Kabupaten Cirebon.

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN DAN RUANG KELAS JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	N	S	JML	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Bkn Milik	Seluruh
1	Waled	23	0	23	113	40	9	162	8	170
2	Ciledug	21	1	22	86	24	14	124	0	124
3	Losari	20	0	20	89	26	12	127	0	127
4	Babakan	30	0	30	145	44	17	206	0	206
5	KR Sembung	22	0	22	72	30	12	114	0	114
6	Lemahabang	26	1	27	105	66	7	178	1	179
7	Sedong	22	0	22	89	24	6	119	2	121
8	Astana Japura	22	2	24	97	44	22	163	0	163
9	Mundu	23	1	24	78	47	11	136	0	136
10	Beber	19	0	19	84	33	6	123	0	123
11	Sumber	32	6	38	172	87	50	309	8	317
12	Palimanan	29	0	29	96	58	18	172	12	184
13	Plumbon	31	0	31	131	49	13	193	0	193
14	Weru	24	0	24	129	28	13	170	0	170
15	Kapetakan	20	0	20	102	28	7	137	6	143
16	Klangenan	24	1	25	96	44	10	150	6	156
17	Arjawinangun	26	1	27	98	74	30	202	0	202
18	Ciwaringin	16	0	16	73	36	7	116	0	116
19	Susukan	28	1	29	136	56	10	202	0	202
20	Gegesik	31	0	31	129	51	18	198	0	198
21	Susukan Lebak	20	0	20	70	43	17	130	1	131
22	Pabedilan	24	1	25	76	41	30	147	0	147
23	Dukupuntang	28	0	28	114	38	25	177	0	177
24	Panguragan	20	1	21	74	41	12	127	0	127
25	Kaliwedi	16	0	16	69	23	6	98	0	98
26	Pangenan	15	0	15	53	16	16	85	1	86
27	Gebang	24	2	26	139	25	14	178	8	186
28	Depok	26	1	27	137	48	0	185	6	191
29	Kedawung	15	3	18	92	34	13	139	0	139
30	Karangwareng	16	0	16	54	37	4	95	5	100
31	Talun	23	3	26	112	58	17	187	8	195
32	Gunung Jati	30	2	32	127	42	35	204	8	212
33	Pasaleman	13	0	13	48	22	9	79	0	79
34	Pabuaran	15	0	15	79	23	3	105	0	105
35	Tengah Tani	18	0	18	80	28	4	112	0	112
36	Plered	22	0	22	108	33	19	160	0	160
37	Gempol	18	1	19	78	40	7	125	11	136
38	Greged	19	0	19	88	28	10	126	0	126
39	Suranenggala	20	0	20	102	16	0	118	0	118
40	Jamblang	20	1	21	83	25	22	130	6	136
JML		891	29	920	3.903	1.550	555	6.008	97	6.105

Profil Pendidikan 2016/2017

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	N	S	JML	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Bkn Milik	Seluruh
1	Waled	41	3	1	41	3	1	45	5	50
2	Ciledug	45	9	0	45	9	0	54	4	58
3	Losari	58	10	3	58	10	3	71	0	71
4	Babakan	55	6	2	55	6	2	63	2	65
5	Karang Sembung	37	13	5	37	13	5	55	0	55
6	Lemahabang	53	11	0	53	11	0	64	0	64
7	Sedong	20	6	1	20	6	1	27	0	27
8	Astana Japura	36	9	11	36	9	11	56	2	58
9	Mundu	27	4	6	27	4	6	37	6	43
10	Beber	44	3	0	44	3	0	47	0	47
11	Sumber	83	8	2	83	8	2	93	0	93
12	Palimanan	114	18	7	114	18	7	139	3	142
13	Plumbon	50	7	8	50	7	8	65	0	65
14	Weru	64	7	3	64	7	3	74	0	74
15	Kapetakan	36	6	7	36	6	7	49	24	73
16	Klangenan	39	2	0	39	2	0	41	0	41
17	Arjawinangun	64	14	2	64	14	2	80	27	107
18	Ciwaringin	74	7	5	74	7	5	86	0	86
19	Susukan	42	6	9	42	6	9	57	0	57
20	Gegesik	125	8	0	125	8	0	133	0	133
21	Susukan Lebak	35	7	2	35	7	2	44	0	44
22	Pabedilan	45	9	0	45	9	0	54	0	54
23	Dukupuntang	61	2	4	61	2	4	67	4	71
24	Panguragan	24	8	0	24	8	0	32	0	32
25	Kaliwedi	46	3	0	46	3	0	49	6	55
26	Pangenan	34	17	4	34	17	4	55	0	55
27	Gebang	35	12	7	35	12	7	54	0	54
28	Depok	61	6	0	61	6	0	67	5	72
29	Kedawung	27	9	6	27	9	6	42	0	42
30	Karangwareng	18	0	0	18	0	0	18	5	23
31	Talun	10	17	0	10	17	0	27	0	27
32	Gunung Jati	81	4	3	81	4	3	88	0	88
33	Pasaleman	23	2	4	23	2	4	29	0	29
34	Pabuaran	33	0	8	33	0	8	41	0	41
35	Tengah Tani	28	1	2	28	1	2	31	0	31
36	Plered	57	3	4	57	3	4	64	0	64
37	Gempol	36	0	0	36	0	0	36	0	36
38	Greged	22	3	0	22	3	0	25	0	25
39	Suranenggala	46	11	3	46	11	3	60	0	60
40	Jamblang	30	14	5	30	14	5	49	27	76
JML		1.859	285	124	1.859	285	124	2.268	120	2.388

Profil Pendidikan 2016/2017

JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NO	KECAMATAN	NEGERI	SW AST A	JML	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruan g Kelas	Ruan g Kelas
					Baik	R. Ringa n	R. Berat	Jml		
1	Waled	1	0	1	23	0	0	23	0	23
2	Ciledug	1	1	2	13	10	4	27	2	29
3	Losari	1	1	2	25	3	2	30	0	30
4	Babakan	1	1	2	26	6	4	36	0	36
5	Karang Sembung	0	1	1	4	0	0	4	0	4
6	Lemahabang	1	2	3	41	11	2	54	2	56
7	Sedong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Astana Japura	1	0	1	23	2	0	25	0	25
9	Mundu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beber	1	1	2	28	3	5	36	0	36
11	Sumber	1	1	2	35	0	0	35	0	35
12	Palimanan	1	1	2	33	4	2	39	0	39
13	Plumbon	1	1	2	24	5	1	30	0	30
14	Weru	0	1	1	3	0	0	3	0	3
15	Kapetakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Klangenan	0	1	1	2	0	1	3	0	3
17	Arjawinangun	1	0	1	12	10	8	30	0	30
18	Ciwaringin	1	0	1	26	0	0	26	0	26
19	Susukan	1	1	2	19	4	8	31	0	31
20	Gegesik	1	2	3	31	6	5	42	0	42
21	Susukan Lebak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pabedilan	1	1	2	9	11	2	22	0	22
23	Dukupuntang	1	2	3	21	2	9	32	0	32
24	Panguragan	0	1	1	12	0	0	12	0	12
25	Kaliwedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Pangenan	0	1	1	2	0	0	2	0	2
27	Gebang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kedawung	0	4	4	22	5	0	27	0	27
30	Karangwareng	1	0	1	17	0	4	21	0	21
31	Talun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Gunung Jati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Pasaleman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Pabuaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tengah Tani	0	1	1	3	2	0	5	0	5
36	Plered	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gempol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Greged	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Suranenggala	1	0	1	18	3	0	21	21	42
40	Jamblang	1	0	1	8	10	10	28	0	28
JML		19	25	44	480	97	67	644	25	669

Profil Pendidikan 2016/2017

JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO	KECAMATAN	N	S	JML	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah		
1	Waled	0	1	1	16	0	0	16	0	16
2	Ciledug	0	2	2	38	2	0	40	0	40
3	Losari	0	2	2	18	7	1	26	0	26
4	Babakan	0	3	3	21	0	2	23	2	25
5	Karang Sembung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Lemahabang	1	4	5	91	11	0	102	0	102
7	Sedong	0	1	1	6	0	0	6	0	6
8	Astana Japura	0	5	5	58	1	0	59	0	59
9	Mundu	1	2	3	60	8	0	68	0	68
10	Beber	0	1	1	6	2	0	8	0	8
11	Sumber	0	4	4	44	0	0	44	8	52
12	Palimanan	0	4	4	60	2	0	62	0	62
13	Plumbon	0	4	4	21	0	0	21	0	21
14	Weru	0	2	2	57	0	0	57	0	57
15	Kapetakan	0	2	2	4	0	0	4	0	4
16	Klangenan	0	1	1	2	0	0	2	0	2
17	Arjawinangun	0	5	5	16	0	0	16	0	16
18	Ciwaringin	0	4	4	37	0	0	37	3	40
19	Susukan	1	2	3	39	0	0	39	0	39
20	Gegesik	0	5	5	42	9	4	55	0	55
21	Susukan Lebak	0	1	1	5	0	0	5	0	5
22	Pabedilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dukupuntang	0	8	8	66	6	0	72	3	75
24	Panguragan	0	2	2	10	0	0	10	0	10
25	Kaliwedi	0	2	2	7	5	0	12	0	12
26	Pangenan	0	4	4	12	6	0	18	3	21
27	Gebang	1	2	3	34	0	0	34	0	34
28	Depok	0	4	4	72	2	0	74	0	74
29	Kedawung	1	10	11	194	2	0	196	0	196
30	Karangwareng	0	1	1	6	0	0	6	0	6
31	Talun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Gunung Jati	1	2	3	29	0	0	29	0	29
33	Pasaleman	0	1	1	6	0	0	6	0	6
34	Pabuaran	0	2	2	34	0	0	34	0	34
35	Tengah Tani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Plered	0	2	2	25	0	0	25	0	25
37	Gempol	0	1	1	4	0	0	4	0	4
38	Greged	0	2	2	4	2	0	6	4	10
39	Suranenggala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Jamblang	1	0	1	54	0	0	54	0	54
JML		7	98	105	1.198	65	7	1.270	23	1.293

Profil Pendidikan 2016/2017

E. Manajemen pengelolaan pendidikan

Seiring bergulirnya era otonomi daerah dimana terdapat pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sehingga membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Otonomi pendidikan memerlukan profesionalisme pengelolaan manajemen baik tingkat Kabupaten, kecamatan maupun tingkat sekolah. Sebagian besar pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah berjalan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kinerja manajemen birokrasi pendidikan masih dirasa kurang sehingga tingkat efisien dan efektifitasnya masih rendah. Kurang tersedia data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel, untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang handal.

Otonomi Daerah juga berdampak pada pengelolaan manajemen ditingkat sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management. Saat ini seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon telah melaksanakan MBS ditandai dengan adanya beberapa prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS diantaranya : sekolah telah memiliki visi, misi dan strategi kearah pencapaian mutu pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat, terbentuknya Komite Sekolah serta adanya transparansi dan akuntabilitas dimana sekolah beserta Komite Sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan sekolah.

F. APK/APM SD

No	KECAMATAN	APK Tingkat SD			APM Tingkat SD		
		Termasuk Paket A			Termasuk Paket A		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Waled	121,42	124,23	122,77	106,56	105,70	106,15
02	Ciledug	132,48	130,57	131,54	117,75	115,56	116,67
03	Losari	140,12	139,10	139,62	121,81	122,92	122,36
04	Babakan	138,08	132,25	135,19	119,21	113,58	116,42
05	Karang Sembung	123,29	123,58	123,43	110,69	111,86	111,27
06	Lemahabang	137,72	139,04	138,36	120,18	120,86	120,51
07	Sedong	123,88	123,47	123,68	110,76	112,58	111,65
08	Astana Japura	133,75	139,87	136,66	124,66	129,90	127,15
09	Mundu	115,03	116,30	115,63	102,62	102,84	102,72
10	Beber	112,35	110,88	111,65	99,64	98,58	99,13
11	Sumber	127,43	128,01	127,71	113,52	112,09	112,84
12	Palimanan	114,00	116,75	115,34	96,98	98,82	97,88
13	Plumbon	114,12	117,87	115,87	100,47	102,95	101,63
14	Weru	120,28	123,06	121,62	108,12	110,79	109,40
15	Kapetakan	137,78	135,43	136,63	122,82	120,06	121,48
16	Klangenan	126,69	121,45	124,12	106,65	101,66	104,20
17	Arjawinangun	134,02	130,76	132,42	115,95	114,12	115,05
18	Ciwaringin	127,32	119,89	123,62	109,61	104,13	106,88
19	Susukan	122,69	129,97	126,23	109,43	115,09	112,18
20	Gegesik	124,85	123,34	124,11	108,83	109,40	109,11
21	Susukan Lebak	117,47	113,36	115,40	107,22	102,20	104,69
22	Pabedilan	142,23	151,04	146,30	123,90	135,20	129,12
23	Dukupuntang	121,03	119,58	120,32	108,34	107,39	107,87
24	Panguragan	132,12	134,05	133,04	119,54	119,03	119,30
25	Kaliwedi	119,44	118,48	118,96	106,56	104,69	105,64
26	Panganan	130,21	135,64	132,73	119,45	122,61	120,92
27	Gebang	116,95	115,96	116,47	102,73	100,53	101,67
28	Depok	110,87	112,38	111,61	96,13	97,10	96,61
29	Kedawung	79,71	72,16	76,01	71,05	64,10	67,65
30	Karangwareng	111,57	111,02	111,30	98,36	97,75	98,07
31	Talun	103,23	105,02	104,09	91,75	91,27	91,52
32	Gunung Jati	108,83	108,45	108,64	95,59	94,97	95,29
33	Pasaleman	107,91	105,97	106,96	96,06	94,17	95,14
34	Pabuaran	111,84	112,11	111,97	96,85	97,06	96,95
35	Tengah Tani	109,46	108,09	108,81	96,62	95,80	96,23
36	Plered	125,22	123,92	124,59	110,29	111,71	110,98
37	Gempol	117,14	107,40	112,46	101,36	94,51	98,07
38	Greged	110,87	115,39	112,99	97,25	99,81	98,45
39	Suranenggala	132,05	130,36	131,25	113,36	114,50	113,90
40	Jamblang	118,21	110,49	114,41	100,81	93,99	97,45
	Rata-rata	120,89	120,69	120,79	106,68	106,30	106,50

Sumber Data: Profil Pendidikan 2016/2017

G. APK/APM SMP

No	KECAMATAN	APK Tingkat SMP			APM Tingkat SMP		
		Termasuk Paket B			Termasuk Paket B		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Waled	102,28	110,74	106,38	82,18	82,51	82,34
02	Ciledug	111,38	134,12	121,97	81,72	98,50	89,54
03	Losari	127,70	138,82	133,05	112,19	120,05	115,97
04	Babakan	115,37	140,98	127,52	93,64	115,41	103,97
05	Karang Sembung	186,15	220,86	202,70	165,37	192,13	178,13
06	Lemahabang	108,85	118,59	113,40	89,35	93,21	91,15
07	Sedong	59,43	62,79	61,06	51,71	53,60	52,63
08	Astana Japura	158,08	157,43	157,76	145,96	149,48	147,70
09	Mundu	60,31	68,09	64,04	52,04	57,94	54,86
10	Beber	122,53	124,81	123,57	103,47	107,27	105,20
11	Sumber	117,89	122,39	120,11	90,27	91,31	90,78
12	Palimanan	236,94	240,00	238,44	193,47	195,99	194,71
13	Plumbon	88,77	98,39	93,36	79,01	85,18	81,95
14	Weru	158,67	164,85	161,63	123,50	132,32	127,73
15	Kapetakan	96,80	98,08	97,41	81,69	75,04	78,52
16	Klangenan	77,63	82,09	79,70	57,77	59,80	58,71
17	Arjawinangun	132,01	154,03	142,80	105,85	124,69	115,08
18	Ciwaringin	358,78	356,64	357,72	299,47	301,22	300,34
19	Susukan	89,57	106,11	97,36	79,66	91,82	85,39
20	Gegesik	110,75	126,08	118,16	84,64	98,09	91,14
21	Susukan Lebak	153,87	159,70	156,67	132,90	139,49	136,07
22	Pabedilan	123,69	145,47	133,90	104,22	121,23	112,20
23	Dukupuntang	150,85	136,41	143,84	120,12	115,24	117,75
24	Panguragan	112,55	118,76	115,55	92,26	97,42	94,75
25	Kaliwedi	108,79	94,01	101,48	89,50	75,91	82,78
26	Panganan	146,43	154,93	150,49	117,79	131,82	124,49
27	Gebang	82,13	75,00	78,48	67,29	63,46	65,33
28	Depok	97,30	94,75	96,05	75,78	73,53	74,67
29	Kedawung	57,24	60,22	58,69	44,60	45,93	45,25
30	Karangwareng	83,73	72,10	78,11	66,61	59,24	63,05
31	Talun	54,20	53,19	53,70	49,22	46,99	48,12
32	Gunung Jati	85,21	93,14	89,06	67,63	73,10	70,28
33	Pasaleman	75,08	74,43	74,76	60,64	56,31	58,54
34	Pabuaran	143,26	168,60	155,07	96,29	118,66	106,72
35	Tengah Tani	56,20	54,74	55,49	39,96	37,26	38,66
36	Plered	95,02	104,10	99,29	73,55	76,47	74,92
37	Gempol	104,50	92,17	98,41	88,17	76,18	82,25
38	Greged	75,90	85,31	80,64	67,38	78,80	73,13
39	Suranenggala	105,80	112,92	109,27	86,44	79,91	83,25
40	Jamblang	77,12	90,63	83,71	60,46	74,17	67,15
	Rata-rata	112,85	119,30	115,97	92,45	97,40	94,85

Sumber Data: Profil Pendidikan 2016/2017

H. AMH

PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEMAMPUAN BACA TULIS
DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN CIREBON (HASIL SURVEI IPM TH 2012)
Laki-laki+Perempuan

No	Kecamatan	Kuantitas			Persentase		
		Bisa	Tidak Bisa	Jumlah	Bisa	Tidak Bisa	Jumlah
		N	N	N	%	%	%
1	010 WALED	38.532	2.667	41.199	93,53	6,47	100,00
2	011 PASALEMAN	18.661	850	19.511	95,64	4,36	100,00
3	020 CILEDUG	31.746	1.111	32.857	96,62	3,38	100,00
4	021 PABUARAN	25.366	1.352	26.718	94,94	5,06	100,00
5	030 LOSARI	38.903	2.319	41.222	94,37	5,63	100,00
6	031 PABEDILAN	37.380	2.687	40.067	93,29	6,71	100,00
7	040 BABAKAN	44.714	3.702	48.416	92,35	7,65	100,00
8	041 GEBANG	42.229	2.271	44.500	94,90	5,10	100,00
9	KARANGSEMBUNG	26.079	967	27.046	96,42	3,58	100,00
10	051 KARANGWARENG	20.620	612	21.232	97,12	2,88	100,00
11	060 LEMAHABANG	37.731	1.510	39.241	96,15	3,85	100,00
12	061 SUSUKAN LEBAK	27.065	1.576	28.641	94,50	5,50	100,00
13	070 SEDONG	28.586	2.225	30.811	92,78	7,22	100,00
14	080 ASTANAJAPURA	54.287	2.581	56.868	95,46	4,54	100,00
15	081 PANGENAN	30.970	1.996	32.966	93,95	6,05	100,00
16	090 MUNDU	52.356	2.771	55.127	94,97	5,03	100,00
17	100 BEBER	26.054	853	26.907	96,83	3,17	100,00
18	101 GREGED	33.899	3.844	37.743	89,82	10,18	100,00
19	111 TALUN	46.269	1.756	48.025	96,34	3,66	100,00
20	120 SUMBER	59.963	2.314	62.277	96,28	3,72	100,00
21	121 DUKUPUNTANG	44.805	2.113	46.918	95,50	4,50	100,00
22	130 PALIMANAN	40.553	2.586	43.139	94,01	5,99	100,00
23	140 PLUMBON	55.231	3.265	58.496	94,42	5,58	100,00
24	141 DEPOK	42.178	2.430	44.608	94,55	5,45	100,00
25	150 WERU	49.757	1.234	50.991	97,58	2,42	100,00
26	151 PLERED	36.699	2.811	39.510	92,89	7,11	100,00
27	161 TENGAH TANI	29.911	1.437	31.348	95,42	4,58	100,00
28	162 KEDAWUNG	48.969	962	49.931	98,07	1,93	100,00
29	171 GUNUNGJATI	57.844	3.340	61.184	94,54	5,46	100,00
30	180 KAPETAKAN	35.666	2.528	38.194	93,38	6,62	100,00
31	181 SURANENGGALA	29.879	2.383	32.262	92,61	7,39	100,00
32	190 KLANGENAN	37.289	3.223	40.512	92,04	7,96	100,00
33	191 JAMBLANG	26.333	1.517	27.850	94,55	5,45	100,00
34	200 ARJAWINANGUN	45.138	3.109	48.247	93,56	6,44	100,00
35	201 PANGURAGAN	30.616	2.776	33.392	91,69	8,31	100,00
36	210 CIWARINGIN	28.466	1.313	29.779	95,59	4,41	100,00
37	211 GEMPOL	30.967	2.423	33.390	92,74	7,26	100,00
38	220 SUSUKAN	46.005	2.491	48.496	94,86	5,14	100,00
39	230 GEGESIK	51.093	3.789	54.882	93,10	6,90	100,00
40	231 KALIWEDI	26.847	1.424	28.271	94,96	5,04	100,00
Jumlah		1.515.656	87.118	1.602.774	94,56	5,44	100,00

Sumber data: Survey IPM tahun 2012

I. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Ranking dan Kecamatan

No	Kecamatan	RLS	No	Kecamatan	RLS
1	TALUN	10,89	21	GEMPOL	6,35
2	KEDAWUNG	9,89	22	PALIMANAN	6,33
3	PLUMBON	8,25	23	CIWARINGIN	6,28
4	KLANGENAN	8,21	24	DEPOK	6,20
5	LEMAHABANG	8,00	25	BABAKAN	6,09
6	TENGAH TANI	7,84	26	ASTANAJAPURA	5,92
7	PABUARAN	7,82	27	SUSUKAN	5,92
8	PLERED	7,82	28	JAMBLANG	5,81
9	GUNUNGJATI	7,80	29	BEBER	5,79
10	KARANGWARENG	7,77	30	MUNDU	5,65
11	WERU	7,54	31	PANGENAN	5,58
12	ARJAWINANGUN	7,50	32	KAPETAKAN	5,58
13	DUKUPUNTANG	7,21	33	WALED	5,54
14	LOSARI	6,91	34	KALIWEDI	5,49
15	CILEDUG	6,90	35	GEGESIK	5,47
16	PASALEMAN	6,79	36	SEDONG	5,41
17	SUMBER	6,79	37	GEBANG	5,11
18	SURANENGGALA	6,72	38	PABEDILAN	5,07
19	KARANGSEMBUN G	6,60	39	PANGURAGAN	4,56
20	SUSUKAN LEBAK	6,50	40	GREGED	4,24
Kabupaten Cirebon					6,89

Sumber data : Survei IPM tahun 20012 Kabupaten Cirebon

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN

1. PERMASALAHAN

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cirebon adalah rata-rata pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon masih berkisar pada 6,89 tahun. Ini menunjukkan tingkat melanjutkan sekolah masih rendah terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Selain itu, Kabupaten Cirebon masih menyisakan kisaran 87 ribu penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih belum melek huruf. Kemampuan melek huruf merupakan kemampuan dasar untuk menyerap pengetahuan dan ketrampilan. Dari sisi fasilitas gedung sekolah, Kabupaten Cirebon masih menghadapi kondisi ruang kelas yang membutuhkan banyak perbaikan. Sementara, dari aspek ketersediaan tenaga pendidik, Kabupaten Cirebon masih menyisakan tenaga pendidik yang tidak layak mengajar terutama dari sisi kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Berdasarkan uraian di atas, pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan akan semakin sulit jika pembangunan sumber daya manusia tidak segera dilakukan percepatan perbaikan melalui pembangunan pendidikan.

2. TELAAHAN VISI MISI KDH

Visi misi dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent*. Kebijakan umum tersebut diantaranya:1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia, melalui

kebijakan peningkatan penyelenggaraan pendidikan umum dan pendidikan agama.

3. TELAHAH VISI MISI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Jawa Barat khusus bidang pendidikan yang akan dilaksanakan selama 2013 – 2018 adalah tercantum pada misi pertama :

Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkannya dibangun beberapa strategi diantaranya: menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1) pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka penuntasan Wajib Dikdas Dua Belas Tahun pada tahun 2018; (2) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pesantren (3) pendidikan terjangkau bagi anak- anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS; (5) peningkatan akses transportasi sekolah di daerah terpencil, serta menuntaskan buta Aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara.

4. TELAHAH VISI MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hasil telaahan kebijakan pembangunan nasional yang terdapat pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014* terdapat beberapa prioritas pembangunan diantaranya:

Prioritas 2 : pendidikan, Tema: Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1). Menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan; 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

5. TELAAHAN RTRW

Pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati.

PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata

sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangeran; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial.

ANALISIS

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.2. Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana di dalamnya mencakup (1) sumberdaya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Kekuatan

- a) Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara efisien dan efektif sehingga dapat berkompetisi di kancah global, hal ini telah dibuktikan

dengan diraihinya beberapa prestasi kejuaraan baik di dalam penguasaan mata pelajaran, seni budaya maupun prestasi olahraga di tingkat Propinsi maupun Nasional.

- b) Adanya kesepakatan dari seluruh jajaran pendidikan untuk mendukung visi Kabupaten Cirebon dirumuskan dalam visi Dinas Pendidikan yang dapat dijadikan Akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat *melalui pembinaan pendidikan yang berkualitas guna mendukung visi Kabupaten Cirebon* ". Implementasi hal tersebut tercermin dalam program dan kegiatan yang selama ini digulirkan serta anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
- c) Tersedianya sumberdaya aparatur pendidik dan kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi sekarang ini.
- d) Tersedianya sarana dan prasarana yang siap untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia global, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran, gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, ketersediaan lahan yang senantiasa siap untuk dibangun dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Sekolah dan masyarakat Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan, pengambilan kebijakan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

3.2.2.Kelemahan

- a) Belum terbangunnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar lini, unit dan institusi pendidikan di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya ego sektoral serta bervariasinya kemampuan SDM aparatur maupun kemampuan daya beli masyarakat yang

- seringkali menjadi kendala di dalam pembangunan di bidang pendidikan.
- b) Belum seragamnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyimpangan terhadap komitmen yang disepakati sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.
 - c) Belum efektifnya rentang kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, hal ini disebabkan karena : (a) Penegakkan hukum tidak/kurang tegas; (b) besarnya populasi persekolahan yang harus diawasi; (c) kurangnya keterlibatan aparaturnya pendidikan yang ada di lapangan dalam melaksanakan pengawasan; dan (d) kurangnya dukungan dana dan fasilitas operasional.
 - d) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena: (a) besarnya populasi persekolahan yang tersebar sampai di pelosok desa; (b) kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; (c) belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi dari tingkat Kabupaten sampai ke sekolah-sekolah sebagai sumber data primer; dan (d) kurangnya dukungan dana operasional dan teknologi sehingga mengakibatkan perencanaan menjadi tidak matang dan pengawasan tidak efektif.

3.3. Analisis Lingkungan Eksternal

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan.

3.3.1 Peluang

- a) Media massa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan.
- b) Adanya kepedulian masyarakat, pengusaha terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (stakeholders) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang difasilitasi melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Badan Akreditasi Sekolah (BAS), *Broad Based Education (BBE) and Life Skill* serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Dewan Pendidikan (DP)/ Dewan Sekolah, sampai kepada Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP).
- c) Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang merupakan lintasan antar propinsi-propinsi di Indonesia memiliki nilai strategis untuk menjadi pintu gerbang dan cermin pendidikan bukan hanya pada skala propinsi tapi juga pada skala Nasional. Hal ini menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara akseleratif dan berkesinambungan.

3.3.2 Tantangan

- a) Kabupaten Cirebon sebagai tempat tujuan untuk mencari kerja/nafkah seiring pertumbuhan dunia industri mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya Rintisan Wajar 12 Tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.
- b) Geografis Kabupaten Cirebon yang cukup luas dan masih terdapat beberapa daerah terpencil. Hal ini telah menyebabkan tidak meratanya

penyebaran pelayanan pendidikan sehingga menjadi tantangan berat di dalam melakukan inovasi dan akselerasi pendidikan.

- c) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak. Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, menjadi primadona dalam pencapaian IPM 80 serta dibebani dampak reformasi yang kebablasan, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan Strategis digunakan teknis analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.4 Permasalahan yang dihadapi

Semakin hari permasalahan pendidikan bukannya semakin berkurang, justru permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan tuntutan globalisasi segala penjuru kehidupan dimana filter tidak lagi dapat membendung sisi negatif dari seluruh interaksi setiap individu. Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 3 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

3.4.1 Peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan

- a) Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah ;
- b) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
- c) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
- d) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
- e) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

3.4.2 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

- a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
- b) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
- c) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
- d) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;
- e) Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan
- f) kolaborasi dalam pembaruan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
- g) belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;
- h) belum ditetapkan standar mutu yang menjadi indikator pencapaian program;
- i) belum terdapat kebijakan untuk menetapkan kendali mutu yang merupakan rencana implementasi kebijakan tingkat nasional
- j) Lulusan sekolah kurang memiliki ketrampilan dan kecakapan hidup;

3.4.3 penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik

- a) kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
- b) Belum tersedia data pendidikan yang akurat disebabkan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
- c) Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;
- d) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
- e) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
- f) proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
- g) Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi Dinas Pendidikan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan merupakan komitmen (keinginan dan cita-cita) segenap jajaran Pengelola dan Pemerhati Bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon. Visi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil serangkaian pembahasan yang melibatkan unsur-unsur pengelola dan pemerhati pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Visi pendidikan dirumuskan dengan sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata serta permasalahan pendidikan di Kabupaten Cirebon, dan untuk pencapaiannya harus dilakukan melalui penggalian, penerahan dan pengembangan potensi-potensi bidang pendidikan yang ada agar dapat membelikan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Keberhasilan pencapaian visi Dinas pendidikan diukur dengan tingkat pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) ditandai dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pencapaian IPM di Kabupaten Cirebon.

Pemikiran-pemikiran di atas menjadi dasar penetapan visi Dinas Pendidikan dalam rangka pengelolaan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Visi tersebut adalah “ **TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG CERDAS DAN KOMPETITIF** “

Visi tersebut menggambarkan cita-cita masyarakat Kabupaten Cirebon untuk meraih kecerdasan dan kompetisi yang setinggi-tingginya. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan verbal, kecerdasan matematis, kecerdasan

visual spasial, kecerdasan kinestetis, kecerdasan musikal, kecerdasan inter personal, kecerdasan intra personal dan kecerdasan natural (multiple intelegence) serta memiliki jiwa kompetitif.

Pengertian Cerdas dan Kompetitif

<p>Multiple Intelegence</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecerdasan Verbal Beraktualisasi diri melalui kecerdasan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mengekspresikan makna, ide atau gagasan-gagasan. • Kecerdasan Matematis Beraktualisasi diri melalui kecerdasan penggunaan logika untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasi-operasi matematika. • Kecerdasan Visual Spasial Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah bentuk dan ruang tiga dimensi. • Kecerdasan Kinestetis – Fisik Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah fisik. • Kecerdasan Musikal Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan sensitivitas terhadap pola tinada, melodi, ritme dan nada. • Kecerdasan Inter – Personal Beraktualisasi diri melalui pemahaman dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain (Learning to life together). • Kecerdasan Intra – Personal Beraktualisasi diri untuk memahami diri sendiri dan
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>pengendalian diri untuk menumbuhkan/memperkuat keimanan dan ketaqwaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecerdasan Natural Beraktualisasi diri melalui kemampuan mengobservasi pola – pola alam dan memahami sistem alamiah atau sistem buatan manusia.
Kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, bersahabat dengan perubahan, inovatif, menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar sepanjang hayat.

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4.2 MISI

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik;
2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten;
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan.

Adapun penjelasan dari Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik
Tuntutan dunia global diantaranya layanan pendidikan yang bermutu. Kata bermutu diatas mengandung makna sangat kompleks seiring dengan kompleksnya peserta didik itu sendiri, karena salah satu tugas guru harus dapat memanusiakan manusia.

Layanan pendidikan yang bermutu meliputi 1) Sumber Daya Manusia/SDM, 2) sarana prasarana serta 3) manajemen pendidikan.

SDM pendidikan atau guru menempati posisi sangat penting dalam menjembatani transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan potensi siswa sesuai bakat, minat yang dimiliki. Oleh karena itu agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu, perlu adanya guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi pendidikan S1, tersertifikasi, memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai perkembangan dan sebagai bentuk upaya penyempurnaan diberbagai bidang. Tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran berkembang terus sampai pada tahun 1984 dinamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan terakhir tahun 2013 Kurikulum 2013 (KURTIKAS).

Begitu pentingnya sehingga kurikulum selalu mengalami perubahan dengan tujuan dapat memaksimalkan hasil pendidikan dengan cara menjalankannya sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena diisi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP, SMA dan SMK 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdimilikinya.

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembangunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

4. Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

4.3 TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

4.3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta didik

Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model

pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

4.3.2 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integritas dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

4.3.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sara dan prasarana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melalui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.3.3.1 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin,

sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu.

4.4 SASARAN STRATEGIS

Berdasar pada Visi, Misi dan Tujuan, beberapa sasaran ditargetkan untuk direalisasikan melalui program/kegiatan sesuai skala prioritas.

4.4.1 Meningkatkan Indeks Pendidikan

Pembangunan manusia kian mendapat perhatian dari penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah. Indikasinya, pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia atau IPM.

Adanya target IPM dalam rencana pembangunan selayaknya disambut positif karena IPM merupakan gambaran tingkat kemampuan sumber daya manusia yang terukur. Target IPM harus obyektif dan rasional. Indikator yang mendasari IPM perlu diupayakan secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target yang telah dicanangkan dapat tercapai. Indikator tersebut adalah angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Berdasarkan data hasil survey IPM tahun 2012 RLS Kabupaten Cirebon baru mencapai 7,01 tahun dan sasaran tahun 2019 ditargetkan mencapai 8,03 tahun. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2019 masyarakat Kabupaten Cirebon minimal sudah mendekati tamat SMP sederajat.

Sedangkan AMH Kabupaten Cirebon tahun 2012 menunjukkan angka 93,52% dan ditargetkan tahun 2019 sebesar 95,74%.

4.4.2 Meningkatnya kesempatan dan pemerataan pendidikan

Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) menghendaki tidak ada seorang pun masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Disamping itu perlu dibangun pelayanan pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat terkait dengan beberapa hal seperti biaya, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta sistem informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan.

Sosialisasi berbagai model pelayanan pendidikan harus menyentuh langsung pada sasaran tidak hanya dilakukan oleh pengelola pendidikan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta jalur – jalur strategis memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penentu bagi semua jalur dan jenjang pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau sampai kedaerah terpencil sekalipun.

4.4.3 Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan

Mutu, relevansi dan daya saing adalah hal yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, tidak jarang harapan untuk meningkatkan kualitas hidup

melalui bangku pendidikan adalah jalan satu-satunya yang dipercaya dapat mewarnai keberhasilan dalam berbagai kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun demikian peningkatan mutu masih terus harus dipacu mengingat masih rendahnya mutu pendidikan yang ditandai dengan rendahnya nilai jual lulusan bahkan terhadap pekerjaan tertentu tanda bukti kelulusan / izazah tidak dijadikan barometer akibatnya sebagian orang berpendapat bahwa sekolah hanyalah perbuatan sia-sia, membuang waktu dan kesempatan karena dengan menempuh pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap dirinya.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan teknis seperti pelaksanaan MGMP dan sejenisnya serta pelatihan yang diberikan langsung terhadap peserta didik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten sehingga secara bertahap dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing untuk dapat menapaki pintu gerbang globalisasi.

4.4.4 Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatkan mutu/kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integritas dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

4.4.5 Meningkatkan mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melalui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.4.6 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu.

4.4.7 Meningkatkan peran serta masyarakat

Peranserta masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat diwujudkan melalui sosialisasi, pembinaan komite sekolah, forum masyarakat peduli pendidikan serta kegiatan lain yang memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang peran masyarakat dan komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

VISI MISI TUJUAN SASARAN TAHUN 2014 - 2019

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS								
				SASARAN	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG CERDAS DAN KOMPETITIF	1. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik	1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta didik	1.1.1 Meningkatnya Indeks Pendidikan	1.1.1.1 Meningkatnya kemampuan membaca	Angka melek huruf	93,52	93,89	94,26	94,63	94,83	95,03	95,23
				1.1.1.2 Meningkatnya taraf pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	6,89	7,01	7,40	7,50	6,50	6,75	7,00
					Angka Harapan Sekolah				11,9	11,93	11,95	11,98
				1.1.1.3 Meningkatnya kesempatan dan pemerataan pendidikan	MELEK HURUF AL-QUR'AN							
					SD (%)		30	38	46	54	62	70
					SMP (%)		40	47	54	61	68	75
					SMA (%)		45	52	59	66		
					SMK (%)		45	52	59	66		
					APK							
					PAUD (%)	33,5	34,6	35,6	36,7	37,8	38,9	40
					SD (%)	110	110,0	110	109	109	109	109,0
					SMP (%)	111	111,0	110	110	110	110	110,0
					SM (%)	78,6	79,06	79,54	80,02	80,5		
					APM							
PAUD (%)						37,80	38,90	40,00				
SD (%)	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96					
SMP (%)	89,30	89,50	89,70	89,90	90,10	90,30	90,50					

	SM (%)	59,88	60,36	60,84	61,32	61,8		
1.1.1.4 Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)							
	SD (%)	2,3	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24
	SMP (%)	0,24	0,23	0,22	0,21	0,2	0,19	0,18
	SMA (%)	0,68	0,66	0,64	0,62	0,6		
	SMK (%)	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14		
	ANGKA LULUSAN (AL)							
	SD (%)	100	100	100	100,0	99,95	99,96	99,97
	Paket A (%)					85,00	86,00	88,00
	SMP (%)	100	100	100	100,0	99,94	99,95	99,96
	Paket B (%)					85,00	86,00	88,00
	SMA (%)	100	100	100	100,0	99,93		
	Paket C (%)					85,00	86,00	88,00
	SMK (%)	99,51	99,58	99,64	99,71	99,77		
	ANGKA MELANJUTK AN							
	SD ke SMP (%)					90,01	90,03	90,05
	RATA-RATA NILAI UN/US							
SD					77,55	78	78,33	
SMP					28,00	28,50	29,00	

2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten	2.1 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;	2.1.1 Guru bersertifikat pendidik	2.1.1.1 Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	2.1.1.1.1 GURU LAYAK MENGAJAR (Minimal S1)									
				PAUD (%)					61,80	62,30	62,80		
				SD (%)	77,97	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50		
				SMP (%)	94,42	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50		
				SMA (%)	95,8	96,25	96,50	96,75	97,00				
	SMK (%)	94,51	94,76	95,01	95,26	95,51							
	3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	3.1.1 Sarana prasarana pendidikan sesuai SPM	3.1.1.1 Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan	3.1.1.1.1 RUANG KELAS BAIK								
					PAUD (%)					66,70	67,20	67,70	
					SD (%)	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
					SMP (%)	77,9	78,20	78,60	78,90	79,30	79,60	80,00	
SMA (%)					75,77	77,31	78,85	80,38					
SMK (%)				88,4	88,67	88,93	89,20						
3.1.1.1.2 TERAKRIDIT ASI				PAUD (%)									
				SD (%)					99,95	99,96	99,97		
				SMP (%)					98,00	98,50	99,00		
				PKBM (%)						20,00	50,00		
	3.1.1.1.3 RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/10.000 PENDUDUK SD/MI												
SD/MI (Unit)						54,33	54,00						

					SMP/MTs (Unit)							30,8	30,85			
					3.1.1.1.4 RASIO GURU/SISWA											
					SD (%)							22,00	21,00	20,00		
					SMP (%)							16,00	18,00	20,00		
					3.1.1.1.5 RASIO SISWA/KLS (S/K)											
					SD	28	28,67	29,33	30,00	30,66	31,33	32,00				
					SMP	23	25,17	27,33	29,50	31,66	33,83	36,00				
					SMA	35	35,17	35,33	35,50	35,66						
					SMK	37	36,83	36,67	36,50	36,33						
	4. Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan	4.1 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tatakelola pendidikan;	4.1.1 Partisipasi masyarakat	4.1.1.1 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan	4.1.1.1.1 INDEK KEPUASAN MASYRAKAT											
SD												78,37	78,5	79,3		
SMP												77,28	77,51	77,64		
4.1.1.1.2 MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH																
SD (%)					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
SMP (%)					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
SMA (%)				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
SMK (%)				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
							4.1.1.2 Meningkatnya peran serta masyarakat	4.1.1.2.1 KOMITE SEKOLAH								
SD (%)				100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
SMP (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0					
SMA (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0							
					SMK (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2014—2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis serta RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2013. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2014--2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

5.1 STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu.

5.1.1 Penyediaan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru kelas mengampu mata pelajaran untuk satu rombongan belajar, sedangkan guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Guru tersebut wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Apabila diamati secara seksama, guru negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK terdapat kekurangan. Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Penataan guru mutlak perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan jumlah rombel atau jumlah jam pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah guru adalah dengan menggunakan data Dapodik sebagai basis satu-satunya data dalam seluruh program dan kegiatan. Dari data tersebut dibangun aplikasi yang dapat memcerminkan berapa jumlah rombel dan berapa guru yang ada sehingga diketahui berapa kekurangan guru di sekolah tersebut. Begitu juga untuk jenjang SMP, SMA, SMK berapa guru mata pelajaran tertentu dibutuhkan disekolah tertentu sehingga Dinas Pendidikan dapat mengambil kebijakan untuk langkah selanjutnya.

Langkah pintas yang dapat dilakukan adalah dengan menunjuk guru honorer untuk memenuhi kekurangan tersebut agar pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya.

5.1.2 Penyediaan dan Sara Prasarana Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombongan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m², sedangkan luas bangunan minimal 400 m².

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombongan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m², semakin banyak jumlah rombongan semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m² untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombongan semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

Satu SMA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Satu SMA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA baru. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMA dengan 3 Rombongan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 2.170 m², semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 650 m² untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

5.1.3 Penyediaan Layanan Untuk Meningkatkan Keterjangkauan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk merealisasikannya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

- a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;
- b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten

Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;

- c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;
- d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

5.1.4 Penyediaan dan Pengembangan Sistem Pembelajaran

Penyediaan dan Pengembangan Sistem Pembelajaran terdiri dari beberapa Komponen yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentuan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

d) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran harus dikembangkan jadi

bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

e) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

f) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukkan dengan bendanya atau tiruannya.

g) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekspresikan suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

5.1.5 Penyediaan dan Pengembangan Layanan Data dan Informasi Pendidikan

Layanan data dan informasi pendidikan melalui proses kolekting data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

5.2.1 Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) menghendaki tidak ada seorang pun masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Disamping itu perlu dibangun pelayanan pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan msyarakat terkait dengan beberapa hal seperti biaya, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta sistem informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan.

Sosialisasi berbagai model pelayanan pendidikan harus menyentuh langsung pada sasaran tidak hanya dilakukan oleh pengelola pendidikan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta jalur – jalur strategis memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. ebijakan pemenuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penentu

bagi semua jalur dan jenjang pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau sampai kedaerah terpencil sekalipun.

5.2.2 Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing

Mutu, relevansi dan daya saing adalah hal yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, tidak jarang harapan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui bangku pendidikan adalah jalan satu-satunya yang dipercaya dapat mewarnai keberhasilan dalam berbagai kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun demikian peningkatan mutu masih terus harus dipacu mengingat masih rendahnya mutu pendidikan yang ditandai dengan rendahnya nilai jual lulusan bahkan terhadap pekerjaan tertentu tanda bukti kelulusan / izazah tidak dijadikan barometer akibatnya sebagian orang berpendapat bahwa sekolah hanyalah perbuatan sia-sia, membuang waktu dan kesempatan karena dengan menempuh pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap dirinya.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan teknis seperti pelaksanaan MGMP dan sejenisnya serta pelatihan yang diberikan langsung terhadap peserta didik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten sehingga secara bertahap dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing untuk dapat menapaki pintu gerbang globalisasi.

5.2.3 Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme para pelaksana dalam mendorong terlaksananya manajerial yang tangguh dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil sesuai target.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan diantaranya harus memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki tujuan yang dirumuskan dalam suatu bentuk perencanaan yang akan dicapai dalam sitiap tahapan sesuai target.

Disisi lain pengelolaan pendidikan harus dapat menyajikan data yang akurat, tepat, akuntabel dan mudah diakses apalagi dalam kondisi saat ini di mana pendidikan sedang menjadi primadona dan menjadi sorotan hampir seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi internet.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal diperlukan program dan kegiatan yang berkualitas bagi anak usia dini, SD, SMP serta pendidikan lain yang setara. Isi, proses dan penilaian merupakan tiga standar nasional pendidikan yang terintegrasi menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelaksanaan tiga standar tersebut sangat menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Keterpaduan antar isi, proses dan penilaian tidak terlepas dari nilai-nilai moral, religi dan budaya keluarga serta masyarakat setempat sebagai tanggungjawab bersama.

Agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud melalui pembiasaan kehidupan siswa, program/kegiatan prioritas yang akan dilakukan sebagai berikut.

5.1 NON URUSAN

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor

5.2 URUSAN

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Wajib Belajar Sembilan Tahun
- c. Pendidikan Menengah
- d. Pendidikan Non Formal
- e. Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- f. Manajemen Pelayanan Pendidikan
- g. Peningkatan Kualitas Hidup Keagamaan

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Pemerintah. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Untuk itu rencana program/kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR SASARAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja program (Outcome) dan (Output)	Ca pai an Th Aw al Per enc ana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Akhir periode Renstra SKPD		
				tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	
	JUMLAH TOTAL				177.242.056.023		210.564.875.013		249.517.223.908		368.421.292.539		405.250.268.968		1.410.995.716.450	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				724	2.663.769.821	796	2.946.022.586	876	3.240.624.844	964	3.564.687.328	1.060	3.921.156.061	4.420	16.336.260.640
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa telepon, listrik dan air 42 unit	42	42	326.783.600	46	359.461.960	51	395.408.156	56	434.948.972	61	478.443.869	256	1.995.046.556
01	06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Perijinan kendaraan roda 2 dan roda 4	233	233	66.413.400	256	73.054.740	282	80.360.214	310	88.396.235	341	97.235.859	1.422	405.460.448
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor 42 pkt	42	42	400.371.455	46	440.408.601	51	484.449.461	56	532.894.407	61	586.183.847	256	2.444.307.770
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan 42 pkt	42	42	281.022.016	46	325.000.000	51	357.500.000	56	393.250.000	61	432.575.000	256	1.789.347.016
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Komponen instalasi listrik 42 pkt	42	42	45.773.750	46	50.351.125	51	55.386.238	56	60.924.861	61	67.017.347	256	279.453.321
01	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Surat kabar nasional, regional, lokal	280	280	600.000.000	308	660.000.000	339	726.000.000	373	798.600.000	410	878.460.000	1.709	3.663.060.000
01	17	Penyediaan makan dan Minum	Makanan dan minuman 42 pkt	42	42	601.508.600	46	661.659.460	51	727.825.406	56	800.607.947	61	880.668.741	256	3.672.270.154
01	18	Penyediaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi 6 pkt	1	1	281.897.000	1	310.086.700	1	341.095.370	1	375.204.907	1	412.725.398	6	1.721.009.375
01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Surat masuk/keluar teradministrasikan/terarsipkan dengan rapih	1	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	1	87.846.000	6	366.306.000
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				9.359.871.000		6.146.782.600		6.805.442.360		7.860.986.596		8.647.085.256		38.820.167.812
02	03	Pembangunan gedung kantor	Gedung UPT Pendidikan 18 unit	0	3	750.000.000	3	825.000.000	4	907.500.000	4	998.250.000	4	1.098.075.000	18	4.578.825.000
02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 2: 6 pkt	1	1	798.600.000	1	878.460.000	1	966.306.000	1	1.062.936.600	1	1.169.230.260	6	4.875.532.860
02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Alat kelengkapan kantor 6 pkt	1	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	6	1.831.530.000

02	11	Sewa tanah/gedung SD	Tanah untuk ditempati bangunan sekolah	19	19	623.868.000	21	1.500.000.000	23	1.650.000.000	25	1.815.000.000	28	1.996.500.000	116	7.585.368.000
		Sewa tanah/gedung SMP	Tanah untuk ditempati bangunan sekolah									175.000.000		192.500.000		367.500.000
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor terpelihara	42	42	829.837.000	46	1.000.000.000	51	1.100.000.000	56	1.210.000.000	61	1.331.000.000	256	5.470.837.000
02	24	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	Bahan bakar kendaraan roda 2 dan roda 4	234	234	777.546.000	257	855.300.600	283	940.830.660	311	1.034.913.726	343	1.138.405.099	1.429	4.746.996.085
02	28	Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor kondisi baik	1	1	219.850.000	1	241.835.000	1	310.000.000	1	341.000.000	1	375.100.000	6	1.487.785.000
02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meubeulair kondisi baik	640	640	60.170.000	704	66.187.000	774	72.805.700	852	80.086.270	937	88.094.897	3.907	367.343.867
02	42	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor Dinas Pendidikan kondisi baik	0	1	5.000.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	1	563.000.000	1	619.300.000	6	6.812.300.000
02	45	Pengadaan komputer dan jaringan	Komputer dan jaringan	42	1	-	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	6	696.150.000
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				1.010.000.000		1.111.000.000		1.222.100.000		1.444.310.000		1.588.741.000		6.376.151.000
03	01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Mesin absensi	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	5	61.051.000
03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian dinas/batik	0	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.331.000.000	1	1.464.100.000	5	6.105.100.000
03	06	Sosialisasi disiplin pegawai	Peserta sosialisasi	80	1	-	1	-	1	-	1	100.000.000	1	110.000.000	5	210.000.000
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				502.186.700		552.405.370		607.645.907		668.410.498		735.251.547		3.065.900.022
05	02	Sosialisasi perundang-undangan	Peserta sosialisasi	0	1	180.000.000	1	198.000.000	1	217.800.000	1	239.580.000	1	263.538.000	6	1.098.918.000
05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-perundangan			1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	-
05	11	Peningkatan pengelolaan aset	Administrasi aset tertib	1	1	322.186.700	1	354.405.370	1	389.845.907	1	428.830.498	1	471.713.547	6	1.966.982.022
06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				48.327.320		53.160.052	1	58.476.057	1	64.323.663	1	70.756.029	6	295.043.121
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan	1	1	48.327.320	1	53.160.052	1	58.476.057	1	64.323.663	1	70.756.029	6	295.043.121
07		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN SEKTORAL				75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500		457.882.500

07	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-Rencana jangka Menengah (RENJA) Rencana Strategis(RENSTRA)	Renja Dinas Pendidikan th 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	1	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	6	457.882.500
		PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				4.198.622.500		7.476.084.750		8.731.628.525		31.015.566.398		34.103.970.212		85.525.872.385
15	01	Pembangunan gedung sekolah	Tertindaknya pembangunan gedung sekolah 5 unit	0	1	1.500.000.000	1	1.650.000.000	1	1.815.000.000	1	1.996.500.000	1	2.196.150.000	6	9.157.650.000
15	03	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	Tertindaknya pembangunan RKB 1 lokal	0	1	180.000.000	1	510.000.000	1	650.000.000	1	715.000.000	1	786.500.000	6	2.841.500.000
15	07	Pembangunan sarana prasarana bermain	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana PAUD	0	1	0	1	238.600.000	1	250.530.000	1	263.056.500	1	276.209.325	6	1.028.395.825
15	09	Pembangunan, lapangan upacara dan pasilitas parkir.	Tertindaknya pembangunan Lapangan upacara, paga dan tempat parkir	0	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	6	1.831.530.000
15	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah.	Tertindaknya pembangunan jaringan listrik	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	6	610.510.000
15	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Buku reverensi, pengayaan, panduan pendidikan dan raport siswa	1	-	-	-	-	-	392.515.000	1	395.000.000	1	434.500.000	2	1.222.015.000
15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya APE luar dan APE dalam	1	2	750.000.000	2	825.000.000	2	907.500.000	3	998.250.000	3	1.098.075.000	12	4.578.825.000
15	19	Pengadaan meubelair sekolah	Pengadaan meubelair 1 unit	0	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.500	6	91.576.500
15	20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Sarana prasarana perlengkapan sekolah	0	1	143.450.000	1	157.795.000	1	173.574.500	1	190.931.950	1	210.025.145	6	875.776.595
15	45	Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah	Tertindaknya rehabilitasi 1 ruang kelas	0	1	-	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.331.000.000	6	4.641.000.000
15	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Tertindaknya lomba guru, pengawas dan penilik berprestasi	0		-	-	-	-	38.350.300	1	45.253.350	1	49.778.685	2	133.382.335
15	58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Motivasi peserta didik untuk meningkatkan prestasi	0	1	0	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	6	696.150.000
15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan PAUD	104	1	430.000.000	1	800.000.000	1	880.000.000	1	968.000.000	1	1.064.800.000	6	4.142.800.000
15	62	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan model pembelajaran PAUD.	Peserta pelatihan penyusunan bahan ajar	70	150	138.000.000	165	151.800.000	182	166.980.000	200	390.678.000	220	429.745.800	916	1.277.203.800

15	64	Perencanaan penyusunan program PAUD	Pengadaan kelengkapan administrasi lembaga PAUD	0	80	587.172.500	88	645.889.750	97	710.478.725	106	781.526.598	117	859.679.257	488	3.584.746.830
15	65	Publikasi dan sosialisasi PAUD	Terlaksananya lomba kelembagaan PAUD, Bunda PAUD	0	300	55.000.000	330	60.500.000	363	66.550.000	399	73.205.000	439	80.525.500	1.832	335.780.500
15	66	Monitoring Evaluasi dan Penaporan	Data peserta didik non formal	0	1	0	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	6	696.150.000
15	67	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	Meningkatkan Mutu Layanan PAUD				1	680.000.000	1	748.000.000	1	822.800.000	1	905.080.000	5	3.155.880.000
15	80	Peningkatan Kesejahteraan guru PAUD non PNS	Honor guru PAUD 3500 guru x 12 bln x 500.000								1	21.000.000.000	1	23.100.000.000	2	44.100.000.000
15		Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD	Terapresiasikannya berbagai kreasi, karya inovasi pembelajaran PAUD								1	250.000.000	1	275.000.000	2	525.000.000
16		PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH				75.551.226.910		92.312.806.001		116.854.543.676		301.502.584.208		331.652.842.629		917.874.003.424
16	01	Pembangunan gedung sekolah SD	Terlaksananya pembangunan USB	1	-	-		1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	2.500.000.000	1	2.750.000.000	3	7.250.000.000
16	03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD	Terbangunnya RKB 153 lokal	7896	25	1.650.000.000	28	3.200.000.000	30	5.177.330.600	33	7.005.000.000	37	7.705.500.000	153	24.737.830.600
16	04	Penambahan ruang guru sekolah SD	Terlaksananya pembangunan R Guru 5 unit	156	-	-	1	400.000.000	1	866.382.500	1	953.020.750	1	1.048.322.825	5	3.267.726.075
16	05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Terlaksananya pembangunan laboratorium 10 pkt	106	2	3.394.559.000	2	3.734.014.900	2	4.107.416.390	3	4.518.158.029	3	4.969.973.832	12	20.724.122.151
16	07	Pembangunan sarana prasarana olah raga SD	Gedung olah raga	6	-	-	-	-	2	800.000.000	2	880.000.000	2	968.000.000	7	2.648.000.000
16	08	Pembangunan ruang serbaguna/aula SD	Ruang serbaguna	0	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	110.000.000	2	210.000.000
16	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	Terlaksananya pembangunan pagar 10 lokasi	1	10	1.650.000.000	11	2.500.000.000	12	5.500.000.000	13	6.050.000.000	15	6.655.000.000	61	22.355.000.000
16	101	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (UN) SMP	Hasil Money BOS dan UN SMP								1	165.000.000	1	181.500.000	2	346500000
16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah SD	Terlaksananya rehab gd perpustakaan 10 unit	96	15	7.517.991.000	17	8.269.790.100	18	9.096.769.110	20	10.006.446.021	22	11.007.090.623	92	45.898.086.854
16	13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah SD	Terlaksananya pembangunan jaringan listrik	5	-		1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	5	139.230.000

16	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	Tersedianya sarana air bersih, mck dan sanitasi SD, SMP	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	200.000.000	1	885.000.000	1	973.500.000	6	2.268.500.000
16	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD	Terlaksananya pengadaan buku raport 1 pkt	1	1	800.000.000	1	4.600.000.000	1	8.500.000.000	1	9.350.000.000	1	10.285.000.000	6	33.535.000.000
16	18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Tersedianya alat praktik peraga siswa 1 pkt	1	1	4.894.843.000	1	6.500.000.000	1	7.150.000.000	1	7.865.000.000	1	8.651.500.000	6	35.061.343.000
16	19	Pengadaan Meubelair Sekolah SD	Terlaksananya pengadaan meubelair 171 lokal	787 8	28	949.300.000	31	1.044.230.000	34	1.200.000.000	37	2.500.000.000	41	2.750.000.000	171	8.443.530.000
16	20	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	Peralatan pendidikan	10	-	-	-	-	1	106.000.000	4	2.000.000.000	4	2.200.000.000	9	4.306.000.000
16	44	Rehab sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SD	Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas 825 lokak	1	825	38.073.546.000	908	41.880.900.600	998	46.068.990.660	1.0 98	100.570.000.000	1.2 08	110.627.000.000	5.0 37	337.220.437.260
16	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah SD/SMP	Terlaksananya rehab laboratorium 12 pkt	0	2	120.000.000	2	132.000.000	2	145.200.000	3	159.720.000	3	175.692.000	12	732.612.000
16	49	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga SMP	Sarana OR di 4 lokasi layak								2	250.000.000	2	275.000.000	4	525.000.000
16	54	Rehabilitasi perpustakaan sekolah SD	Terlaksananya pembangunan perpustakaan 92 unit	0	15	240.000.000	17	264.000.000	18	290.400.000	20	319.440.000	22	351.384.000	92	1.465.224.000
16	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	Pelaksanaan lomba guru berprestasi 6pkt	1	1	278.722.500	1	306.594.750	1	337.254.225	1	370.979.648	1	408.077.612	6	1.701.628.735
16	59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Peserta pelatihan kurikulum 6 pkt	1	1	243.673.550	1	268.040.905	1	700.000.000	1	770.000.000	1	847.000.000	6	2.828.714.455
16	61	Pembinaan SMP Terbuka	Terlaksananya pembelajaran 22 SMPT	22	22	127.440.000	24	140.184.000	27	154.202.400	29	170.000.000	32	187.000.000	134	778.826.400
16	63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD	Pembinaan pengelolaan dan BOS bagi SD	1	1	161.518.000	1	177.669.800	1	4.100.000.000	1	4.510.000.000	1	4.961.000.000	6	13.910.187.800
16	65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI	Terlaksananya pengadaan buku refrensi 6 pkt	1	1	11.725.067.860	1	12.897.574.646	1	14.187.332.111	1	15.606.065.322	1	17.166.671.854	6	71.582.711.792
16	66	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah SMP	Terlaksananya pemberian dana untuk SD, SMP (SATAP, SSN) 6 pkt.	1	1	652.300.000	1	717.530.000	1	789.283.000	1	868.211.300	1	955.032.430	6	3.982.356.730
16	67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Warga belajar Paket A 5000 wb								2.5 00	1.250.000.000	2.5 00	1.375.000.000	5.0 00	2.625.000.000
16	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Warga belajar Paket B 59 klp	59	59	1.109.075.000	65	1.219.982.500	71	1.341.980.750	79	1.600.000.000	86	1.760.000.000	360	7.031.038.250
16	69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan	Terlaksananya lomba gugus dan sekolah sehat	1	2	102.233.000	2	112.456.300	2	123.701.930	3	136.072.123	3	149.679.335	12	624.142.688

		manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar SD														
16	70	Pembinaan bakat minat dan kreativitas siswa SD	Tertaksananya lomba kreatifitas siswa 6 pkt	1	1	677.125.000	1	744.837.500	1	850.000.000	1	935.000.000	1	1.028.500.000	6	4.235.462.500
16	72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMP	Peserta bintek TIK memahami teknis UNBK 6 pkt				1	80.000.000	1	88.000.000	1	5.800.000.000	1	6.380.000.000	5	12.348.000.000
16	73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan SD	Tertaksananya ekspo pendidikan 5 pkt	0			1	80.000.000	1	88.000.000	1	96.800.000	1	106.480.000	5	371.280.000
16	75	Penyediaan Beasiswa Transisi SMP	Tertaksananya pemberian beasiswa transisi 500 siswa	500	500	279.000.000	550	350.000.000	605	470.000.000	1.600	4.600.000.000	1.760	5.060.000.000	5.015	10.759.000.000
16	76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah SD	Pelaksanaan akreditasi 40 sekolah	40	40	128.880.000	44	250.000.000	48	350.000.000	53	385.000.000	59	423.500.000	244	1.537.380.000
16	78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (UN) SD	Monev UN 40 UPT SD	40	40	349.953.000	44	450.000.000	48	495.000.000	53	544.500.000	59	598.950.000	244	2.438.403.000
16	79	Peningkatan kesejahteraan guru PNS dan guru bantu daerah terpencil SD	Honor guru SD 7	7	ora ng	-	-	-	-	1.600.000.000	1	3.360.000.000	1	3.696.000.000	2	8.656.000.000
16	80	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan GBDT SD	Tertaksananya pembayaran honor 8 guru kontrak/GBDT	8	8	96.000.000	9	600.000.000	10	660.000.000	11	726.000.000	12	798.600.000	49	2.880.600.000
16	83	Pelatihan kompetensi pendidik paket B setara SMP	Tertaksananya lomba keteladanan tutor 6 pkt	1	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	6	915.765.000
16	84	Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional SD	Dokumen Penilaian Angka Kredit									124.448.400		136.893.240		261.341.640
16	85	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	RKB SMP	2.268	-	-	-	-	-	-	4	10.000.000.000	4	11.000.000.000	8	21.000.000.000
16	87	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	Pager, pavingisasi, lapangan upacara tertata rapih	0	-	-	-	-	-	-	6	1.200.000.000	7	1.320.000.000	13	2.520.000.000
16	89	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SMP	Sarana air bersih dan jamban sekolah									5.000.000.000		5.500.000.000		10.500.000.000
16	90	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP	Buku reverensi, pengayaan, panduan pendidikan dan raport siswa	0	-	-	-	-	-	-	1	600.000.000	1	660.000.000	2	1.260.000.000
16	91	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Alat peraga dan praktik pembelajaran siswa SMP									3.500.000.000		3.850.000.000		7.350.000.000

16	94	Rehab sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Ruang kelas baik	1.8 59	-	-	-	-	-	-	38	22.000.000.000	42	24.200.000.000	80	46.200.000.000
16	95	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	Peserta pelatihan MGMP SMP 14 Mata pelajaran	0	-	-	-	-	-	-	9	180.700.000	9	198.770.000	18	379.470.000
16	96	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Guru SMP dan calon pendamping mendapat sertifikat	0	-	-	-	-	-	-	2.7 00	350.000.000	2.9 70	385.000.000	5.6 70	735.000.000
16	97	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP	Sekolah bebas pungutan jenjang SMP	185	-	-	-	-	-	-	185	7.746.000.000	204	8.520.600.000	389	16.266.600.000
16	99	Pembinaan bakat minat dan kreativitas siswa SMP	Pelaksanaan lomba OSN, FLS2N, O2SN, TUB, Pasangiri bahasa dan sastra Sunda/Cirebon	0	-	-	-	-	-	-	6	470.000.000	7	517.000.000	13	987.000.000
16		Penyelenggaraan akreditasi sekolah SMP	Tertaksananya penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas									175.000.000		192.500.000		367.500.000
16		Peningkatan kesejahteraan guru PNS dan guru bantu daerah terampil SMP	Honor guru GBDT									500.000.000		550.000.000		1.050.000.000
16		Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan GBDT SMP	Honor guru Non PNS									15.000.000.000		16.500.000.000		31.500.000.000
16		Pembangunan gedung sekolah SMP	Tertaksananya pembangunan USB		-	-						2.500.000.000	-	2.750.000.000	-	5.250.000.000
16		Penambahan ruang guru sekolah SMP	Tertaksananya pembangunan R Guru 5 unit		-	-						953.020.750	-	1.048.322.825	-	2.001.343.575
16		Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	Tertaksananya rehab gd perpustakaan 10 unit									10.006.446.021	-	11.007.090.623	-	21.013.536.644
16		Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah SMP	Tertaksananya pembangunan jaringan listrik		-							36.300.000	-	39.930.000	-	76.230.000
16		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	Tertaksananya pengadaan meubelair 171 lokal									2.500.000.000	-	2.750.000.000	-	5.250.000.000
16		Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional SMP	Dokumen Penilaian Angka Kredit									124.448.400		136.893.240		261.341.640
16		Rehabilitasi perpustakaan sekolah SMP	Tertaksananya pembangunan perpustakaan 92 unit									319.440.000	-	351.384.000	-	670.824.000
16		Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di	Tertaksananya lomba gugus dan sekolah sehat									136.072.123	-	149.679.335	-	285.751.458

17	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tertaksananya pengadaan buku raport 6 pkt	1	1	711.723.500,00	1	782.895.850	1	861.185.435	-	-	-	-	3	2.355.804.785
17		Penyediaan buku pelajaran untuk SMA, SMK	Tertaksananya pengadaan buku referensi 26 sekolah	1	26	15.000.000.000	29	16.500.000.000	31	18.150.000.000	-	-	-	-	86	49.650.000.000
17	18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik peraga siswa 26 sekolah	1	26	2.987.513.870	29	5.500.000.000	31	6.050.000.000	-	-	-	-	86	14.537.513.870
17	19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Tertaksananya pengadaan meubelair 153 lokal	158 0	25	371.250.000	28	408.375.000	30	449.212.500	-	-	-	-	83	1.228.837.500
17		Pembangunan Ruang Penunjang Lain (RPL)	Tertaksananya pembangunan MCK 10 pkt	104 5	2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	-	-	-	-	7	1.655.000.000
17		Rehabilitasi ruang penunjang lain (RPL)	Rehabilitasi MCK 12 pkt	104 5	2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	-	-	-	-	7	1.655.000.000
17	44	Rehab sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Tertaksananya Rehabilitasi ruang kelas 61 lokak	1	10	16.686.551.365	11	18.355.206.502	12	20.190.727.152	-	-	-	-	33	55.232.485.018
17	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Tertaksananya rehab laboratorium 12 pkt	0	2	120.000.000	2	132.000.000	2	145.200.000	-	-	-	-	7	397.200.000
17	53	Rehabilitasi perpustakaan sekolah	Rehabilitasi perpustakaan 12 pkt	0	2	120.000.000	2	132.000.000	2	145.200.000	-	-	-	-	7	397.200.000
17	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Pelaksanaan lomba guru berprestasi 6 pkt	1	1	0	1	80.000.000	1	88.000.000	-	-	-	-	3	168.000.000
17	58	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Peserta pelatihan kurikulum 6 pkt	1	1	192.500.000	1	211.750.000	1	232.925.000	-	-	-	-	3	637.175.000
17	61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Peserta Pelatihan TIK, Website, kursus Bahasa Inggris 250 orang	1	250	286.000.000	275	314.600.000	303	346.060.000	-	-	-	-	828	946.660.000
17	63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Warga belajar Paket C 1225 wb	57	57	1.043.750.000	63	1.200.000.000	69	1.320.000.000	76	2.300.000.000	83	2.530.000.000	348	8.393.750.000
17	64	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Peserta bintek MBS 3 pkt	1	-	-	-	-	1	80.000.000	-	-	-	-	1	80.000.000
17	65	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Peserta bintek TIK 6 pkt	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	88.000.000	-	-	-	-	3	248.000.000
17	66	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMA/SMK	Tertaksananya pemberian dana untuk SSN, eks RSBI 5 pkt.	1			1	100.000.000	1	110.000.000	-	-	-	-	2	210.000.000

17	67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Tertaksananya ekspo pendidikan 6 pkt	1	1	385.000.000	1	423.500.000	1	465.850.000	-	-	-	-	3	1.274.350.000
17	68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah	Tertaksananya akreditasi sekolah	132	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	-	-	-	-	3	91.025.000
17	69	Monitoring Evaluasi dan pelaporan (BOS)	Monev pengelolaan dana BOS 6 pkt	1	1	28.458.925	1	45.000.000	1	49.500.000	-	-	-	-	3	122.958.925
17	70	Pengembangan minat bakat dan prestasi	Tertaksananya lomba Lks dll 6 pkt	1	1	335.500.000	1	369.050.000	1	405.955.000	-	-	-	-	3	1.110.505.000
17	71	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA	Tertaksananya pemberian BOS 6 pkt	1	1	16.500.000.000	1	22.000.000.000	1	24.200.000.000	-	-	-	-	3	62.700.000.000
17	74	Pelatihan kompetensi pendidik paket C setara SMA	Tertaksananya pelatihan kompetensi tutor 977 org	1	160	146.962.500	176	161.658.750	194	177.824.625	213	195.607.088	234	215.167.796	977	897.220.759
17	79	Peningkatan kesejahteraan guru PNS dan guru bantu daerah terpencil	Honor guru PNS dan guru bantu daerah terpencil	10	-	-	-	-	10	200.000.000	-	-	-	-	10	200.000.000
17	80	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan GBDT	Tertaksananya pembayaran honor guru kontrak/GBDT 6 pkt	1	1	859.666.500	1	945.633.150	1	1.040.196.465	-	-	-	-	3	2.845.496.115
PRODRAM PENDIDIKAN NONFORMAL						4.549.698.750		5.084.668.625		5.593.135.488		7.945.071.536		8.739.578.690		31.912.153.089
18	01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Peserta pelatihan instruktur 24 pkt	1	4	180.000.000	4	198.000.000	5	217.800.000	5	239.580.000	6	263.538.000	24	1.098.918.000
18	02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Tertaksananya pemberian bantuan kepada 153 lembaga	0	25	625.000.000	28	687.500.000	30	756.250.000	33	831.875.000	37	915.062.500	153	3.815.687.500
18	03	Pembinaan kursus dan kelembagaan	Penilaian kinerja sebanyak 61 LPK	1	10	150.000.000	11	165.000.000	12	181.500.000	13	199.650.000	15	219.615.000	61	915.765.000
18	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Kegiatan KF sebanyak 4000 klp	554	554	2.552.500.000	609	2.807.750.000	670	3.088.525.000	737	4.300.000.000	811	4.730.000.000	3.382	17.478.775.000
18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Peserta pelatihan life skill 305 orang	0	50	100.000.000	55	110.000.000	61	121.000.000	67	133.100.000	73	146.410.000	305	610.510.000
18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Pelatihan 61 LKP	0	10	150.000.000	11	165.000.000	12	181.500.000	13	199.650.000	15	219.615.000	61	915.765.000
18	07	Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan	Pendataan pendidikan non formal 40 kec	0	40	200.000.000	44	220.000.000	48	242.000.000	53	266.200.000	59	292.820.000	244	1.221.020.000
18	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Sertifikat dan SK Akreditasi lembaga pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	1	90.000.000	1	99.000.000	2	189.000.000
18	09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Peserta pelatiba kurikulum 916 org	300	150	150.000.000	165	165.000.000	182	181.500.000	200	199.650.000	220	219.615.000	916	915.765.000
18	11	Perencanaan penyusunan program pendidikan non formal	Akreditasi 6 pkt	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	6	610.510.000

18	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non formal	Masyarakat buta huruf dan drop out mengikuti program pendidikan non formal 6 pkt	0	1	101.130.000	1	111.243.000	1	122.367.300	1	134.604.030	1	148.064.433	6	617.408.763
18	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (UN)	Monev UN selama 6 pkt	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	6	328.460.000
18	16	Peningkatan pengembangan pendidikan non formal	Peserta pelatihan tutor KF 6 pkt	1	1	191.068.750	1	210.175.625	1	231.193.188	1	254.312.506	1	279.743.757	6	1.166.493.826
18	20	Pengembangan pendidikan luar sekolah berbasis masyarakat	Peserta kegiatan	1	1	-	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	6	348.075.000
18		Peningkatan Kompetensi penilik kesetaraan dan kursus	Guru layak mengajar									250.000.000		275.000.000		525.000.000
18		Sosialisasi penguatan pendidikan keluarga	Meningkatkan mutu pendidikan									250.000.000		275.000.000		525.000.000
18		Bimbingan teknis penguatan pendidikan keluarga	Tutor memahami metode pembelajaran									200.000.000		220.000.000		420.000.000
18		Penyelenggaraan akreditasi PKBM	Pelaksanaan akreditasi								1	100.000.000	1	110.000.000	2	210.000.000
20		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				1.061.076.400		1.583.864.780		1.742.251.258		2.166.076.930		2.382.684.623		8.925.953.991
20	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Sosialisasi sertifikasi 9.158 guru	1300	1.500	183.926.600	1.650	350.000.000	1.815	385.000.000	1.997	423.500.000	2.196	465.850.000	9.158	1.808.276.600
20	02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Peserta pelatihan 1 pkt		-	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	5	928.200.000
20	03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Peserta pelatihan pembelajaran mapel UN 6 pkt	1	1	176.000.000	1	193.600.000	1	212.960.000	1	280.000.000	1	308.000.000	6	1.170.560.000
20	04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Peserta musyawarah KKG 5 pkt	0	-	-	1	80.000.000	1	88.000.000	1	96.800.000	1	106.480.000	5	371.280.000
20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK	Terlaksananya bintek penyusunan profil 6 pkt	1	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	241.576.500	6	1.007.341.500
20	09	Pengembangan Sistem Pemetaan dan Pendataan PTK	Sosialisasi verval NUPTK 345 ORG	345	315	148.915.800	347	163.807.380	381	180.188.118	419	198.206.930	461	218.027.623	1.923	909.145.851
20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Guru berprestasi 1.099 guru	180	180	72.234.000	198	79.457.400	218	87.403.140	240	300.000.000	264	330.000.000	1.099	869.094.540
20	11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Peserta rakoor 345 org	345	345	220.000.000	380	242.000.000	417	266.200.000	459	292.820.000	505	322.102.000	2.106	1.343.122.000

20	12	Pembinaan angka kredit Pendidik	Penilaian angka kredit 6 pkt	0	1	85.000.000	1	93.500.000	1	102.850.000	1	113.135.000	1	124.448.500	6	518.933.500
22		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN				3.642.621.802		4.165.655.022		5.305.708.043		11.038.153.294		12.141.968.624		36.294.106.786
22	01	Pelaksanaan Evaluasi hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Sosialisasi penyusunan evaluasi kinerja 6 pkt	1	1	198.000.000	1	217.800.000	1	239.580.000	1	263.538.000	1	289.891.800	6	1.208.809.800
22	04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Peserta Sosialisasi penyusunan IKM 6 pkt	1	1	198.737.990	1	218.611.789	1	240.472.968	1	264.520.265	1	290.972.291	6	1.213.315.303
22	07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen pendidikan	Sosialisasi teknis pengelolaan NISN 6 pkt	1	1	311.167.340	1	342.284.074	1	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	6	2.639.451.414
22	08	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan (Pendidikan dasar dan menengah)	Peserta pelatihan kurikulum 9.158 guru	1500	1500	1.275.000.000	1,650	1.402.500.000	1,815	1.542.750.000	1,997	1.697.025.000	2,196	1.866.727.500	9,158	7.784.002.500
22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Target kinerja)	Sosialisasi penyusunan laporan target kinerja 6 pkt	1	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1	322.102.000	6	1.343.122.000
22	14	Fasilitasi pelayanan pendidikan SMP	Tertaksananya sosialisasi bahaya narkoba dan kenakalan remaja dan PPDB Online	1	1	151.122.906	1	166.235.197	1	182.858.716	1	4.400.000.000	1	4.840.000.000	6	9.740.216.819
22	15	Penerapan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah	Tertaksananya pembangunan sistem sarana prasana 6 pkt	1	1	264.753.600	1	450.000.000	1	495.000.000	1	544.500.000	1	598.950.000	6	2.353.203.600
22	16	Penyusunan capaian terget SPM bidang Pendidikan	Penyusunan dokumen SPM 6 pkt	1	1	136.358.530	1	149.994.383	1	164.993.821	1	181.493.203	1	199.642.524	6	832.482.462
22	18	Kegiatan expo pendidikan	Peserta expo pendidikan 6 pkt	0	1	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	798.600.000	1	878.460.000	6	3.663.060.000
22	19	Fasilitasi pelayanan pendidikan	Tertaksananya sosialisasi bahaya narkoba 6 pkt	1	1	151.122.906	1	166.235.197	1	182.858.716	1	201.144.588	1	221.259.047	6	922.620.453
23		Peningkatan kualitas hidup keagamaan				136.358.530	1	149.994.383	1	164.993.821	1	181.493.203	1	199.642.524	6	832.482.462
23	01	Peningkatan partisipasi masyarakat lembaga keagamaan	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca Al-Qur'an Siswa SD	0	-	-	-	-	-	500.000.000	1	971.700.000	1	1.068.870.000	2	2.540.570.000
23		Peningkatan partisipasi masyarakat lembaga keagamaan	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca Al-Qur'an Siswa SMP	0	-	-	-	-	-	-	1	581.319.035	1	639.450.939	2	1.220.769.974

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan pencapaian setiap misi RPJMD, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010. Target indikator kinerja daerah khusus bidang pendidikan ditetapkan mengacu pada target Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan arahan RPJPD Kabupaten Cirebon tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah.

Pelayanan Pendidikan selayaknya mendapat prioritas sejalan dengan Visi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam RPJMD Tahun 2014 - 2019 "Mewujudkan Masyarakat yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera" dimana yang dimaksud Sejahtera disini adalah Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tentram. Salah satu kebutuhan pokok/dasar yang dimaksud adalah kebutuhan akan pendidikan. Dengan kata lain masyarakat kesejahteraannya akan terganggu bila kebutuhan untuk memperoleh pendidikan (Formal/Non formal) tidak tercukupi.

Pelayanan pendidikan juga terkait dengan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019 yaitu: **Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berkecakupan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan serta terkait dengan Program Unggulan Kepala Daerah** dimana janji Bupati dan Wakil Bupati Cirebon selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama program pembangunan daerah tahun 2014-2019 khusus bidang pendidikan yaitu:

1. Cirebon Bebas Buta Huruf al Qur'an / Cirebon Melek Huruf Qur'an;
2. Cirebon Bebas Biaya Pendidikan dan Bebas Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah / Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Semua;
3. Cirebon Berbudaya Membaca;

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Th. 0	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th.5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Angka melek huruf	93,89	94,26	94,63	94,83	95,03	95,23	95,23
	Angka rata-rata lama sekolah	7,01	7,4	7,5	6,50	6,75	7,00	7,00
	Angka partisipasi murni (APM)							
	PAUD sederajat				37,8	38,9	40	40
	SD/MI/Paket A	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96
	SMP/MTs/Paket B	89,5	89,7	89,9	90,1	90,3	90,50	90,50
	SMA/SMK/MA/Paket C	60,39	60,84	61,32	61,8			
	Angka partisipasi kasar (APK)							
	PAUD sederajat				37,8	38,9	40	40
	SD/MI/Paket A	111	114	118	122	126	130	130
	SMP/MTs/Paket B	110,52	110,41	110,31	110,21	110,11	110,00	110,00
	SMA/SMK/MA/Paket C	79,06	79,54	80,02	80,5			

BAB VII PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Renstra Dinas Pendidikan merupakan arah untuk mewujudkan suatu komitmen dari seluruh pengelola dan pemerhati pendidikan dalam merealisasikan cita-cita masyarakat Kabupaten Cirebon seperti yang tercantum dalam VISI dan MISI yang diimplementasikan dalam rencana program dan kegiatan tahun 2014-2019.

Jika Renstra dapat dilaksanakan sesuai tahapannya, maka akan terjadi peningkatan IPM masyarakat Kabupaten Cirebon, hal ini menggambarkan tingkat kemampuan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga diharapkan dapat bersaing dalam era global yang penuh kompetisi dan tantangan.

7.2 SARAN

Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan mulai dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama
2. Adanya komitmen seluruh jajaran untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM 76,74 di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif
4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan memobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan

Demikian rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian IPM sesuai target pada tahun 2019.

BUPATI CIREBON

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN **2017**.. NOMOR.....**15**., SERI **E.13**